

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH KALIMANTAN TIMUR



959.843

S

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH

1977/1978

**SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
DAERAH KALIMANTAN TIMUR**



**DITERBITKAN OLEH :
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

TANGGAL	NO. WDUK
15 NOV 1981	1031

P E N G A N T A R

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia kecuali Propinsi Irian Jaya dan Timor Timur.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni :

- Sejarah Daerah,
- Adat Istiadat Daerah,
- Geografi Budaya Daerah,
- Ceritera Rakyat Daerah,
- Ensiklopedi Musik / Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu :

Kegiatan di Pusat, meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi :

Survai lapangan sampai dengan penyusunan nas-

kah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat di-
selesaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir
tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasil-
kan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah
naskah ini belum merupakan suatu hasil penelitian
yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap
pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat
kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disem-
purnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak,
baik dari Perguruan Tinggi Kanwil Dep. P dan K. di
daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Seja-
rah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli per-
orangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan da-
lam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Se-
jarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur
ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan teri-
ma kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian,
Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbaka-
laan, Departemen P dan K Propinsi Kaliman-
tan Timur.

2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Samarinda.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
4. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

- Konsultan : Drs. Serta Tarigan.
- Ketua : Drs. Syahbandi
- Anggota : 1. Haji Djunaid Sanusi
2. Oemar Dahlan
3. Hasjim Achmad.

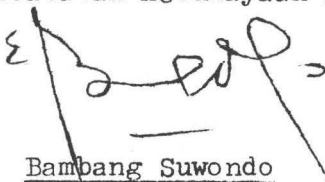
5. Tim penyempurnaan naskah di pusat terdiri dari :

- Konsultan : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
2. Dr. Astrid S. Susanto
3. Abdurachman Suryomihardjo.
4. A.B. Lopian
- Ketua : Sutrisno Kutoyo
- Sekretaris : Soenjata Kartadarmadja
- Anggota : 1. Anhar Gonggong
2. Mardanas Safwan
3. Masjkuri
4. Surachman
5. Muchtaruddin Ibrahim
6. Sri Sutjiatiningsih.

6. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Suwondo', is written over a horizontal line.

Bambang Suwondo
NIP. 130117589.

Sambutan.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kita menyambut dengan rasa gembira, bahwa Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Dep. P dan K. telah berhasil menyusun naskah : Sejarah Daerah, Adat Istiadat Daerah, Geografi Budaya Daerah, Ceritera Rakyat Daerah dan Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Selesainya naskah-naskah ini adalah disebabkan karena adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah-naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya pembangunan ini.

Jakarta,

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio.

NIP. 130119123.

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>BAB I. PENDAHULUAN</u>	1
A. TUJUAN PENELITIAN	2
B. MASALAH	3
C. RUANG LINGKUP	4
D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PRO- SEDUR PENELITIAN	5
E. HASIL AKHIR	6
 <u>BAB II. KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19</u>	 9
A. PEMERINTAHAN	9
B. SOSIAL BUDAYA (PENDIDIKAN, SE- NI BUDAYA)	14
C. KEHIDUPAN EKONOMI	16
D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN	19
 <u>BAB III. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN + 1900 - 1928</u>	 21
A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAE- RAH	21
B. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BER- DIRINYA PARTAI (ORGANISASI)	26
1. <u>Sarekat Islam</u>	27

2. <u>Muhammadiyah</u>	28
3. <u>Nahdatul Ulama</u>	28
C. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG	
DUNIA I (1914 - 1918).....	29
1. <u>Sikap Pemerintah Belanda</u>	29
2. <u>Keadaan Masyarakat (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama)</u>	29
a. Sosial / Ekonomi.....	29
b. Pendidikan.....	31
c. Budaya.....	32
d. Agama.....	33
<u>BAB IV. KEADAAN DAERAH DARI TAHUN 1928-1942</u>	35
A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA TAHUN 1930.....	35
1. <u>Politik Keras Terhadap Gerakan Non-Koperasi</u>	39
2. <u>Undang-Undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonantie)</u>	41
B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH.....	43
C. <u>INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN / ORGANISASI</u>	46
1. <u>P N I - Baru</u>	46
2. <u>Partai Syarikat Islam Indonesia</u>	47

3. <u>Parindra</u>	48
4. <u>Gerindo</u>	54
5. <u>Penyadar</u>	57
6. <u>G A F I</u>	58
7. <u>M I A I</u>	60
8. <u>Petisi Soetardjo</u>	61

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

DA KEDATANGAN TENTARA JEPANG	62
1. <u>Sikap Pemerintah Hindia Belanda</u>	62
2. <u>Keadaan Masyarakat (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama)</u>	65
3. <u>Sikap Masyarakat Terhadap Pemerintah Hindia Belanda</u>	66
4. <u>Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah pada saat terakhir</u>	67
a. Sesudah Perang Dunia II Pecah di Eropa.....	67
b. Sesudah Negeri Belanda diduduki Nazi Jerman.....	69
c. Sesudah Perang Pasifik.....	70

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN	
JEPANG	71
1. <u>Propaganda Jepang yang tera-</u> <u>sa di Indonesia</u>	72
2. <u>Waktu Kedatangan Pasukan Je-</u> <u>pang</u>	74
3. <u>Sikap Jepang Terhadap Aparat-</u> <u>ur Pemerintah Hindia Belan-</u> <u>da.</u>	76
4. <u>Sikap Jepang Terhadap Bangsa</u> <u>Indonesia</u>	77
5. <u>Sikap Bangsa Indonesia Ter -</u> <u>hadap Jepang</u>	80
 BAB V. <u>P E N U T U P</u>	86
<u>DAFTAR TATA NAMA DAN ISTILAH</u>	91
<u>DAFTAR SUMBER</u>	104

B A B I

PENDAHULUAN

Sejarah daerah pada hakekatnya tidak lain dari pada uraian atau ungkapan yang memaparkan suatu aktivitas manusia yang hidup di daerah itu, dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya lahir dan batin dari masa ke masa hingga sekarang ini dan seterusnya kepada masa mendatang.

Karena daerah merupakan bagian dari keseluruhan bangsa, maka sejarah juga merupakan bagian dari Sejarah Nasional, merupakan warisan bangsa, serta sangat berharga untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Dengan demikian mempelajari aktivitas manusia (Indonesia di daerah samalah halnya dengan mempelajari sebagian aktivitas manusia Indonesia seluruhnya.

Sebab bagaimanapun Sejarah Nasional yang didukung oleh sejarah daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan kepribadian nasional, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, demi terciptanya ketahanan nasional semesta bagi negara dan bangsa Indonesia.

Dalam penelitian ini diketengahkan Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur. Menyadari akan pentingnya periode ini terutama dalam are-

na pertarungan menentang penjajahan, maka perlu adanya penelitian yang seksama terhadap tema tersebut. Sebab sedikit atau banyak, besar atau kecil daerah-daerah di seluruh tanah air ini, mempunyai ciri sendiri-sendiri di dalam memberikan jawaban atas tantangan penjajahan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan tetap merupakan andil dalam mewujudkan Indonesia Merdeka sekarang ini. Oleh sebab itu data-data (sementara) yang dikumpulkan dalam naskah ini, hendaknya mendapatkan suatu pengamatan dan penganalisaan yang serius dari para ahli, untuk kemudian dijadikan bahan dalam penulisan Sejarah Nasional dan khususnya Sejarah Daerah.

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sejarah Daerah Kalimantan Timur pada zaman Kebangkitan Nasional untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan kemasyarakatan di bidang sejarah, dalam rangka memantapkan rasa kesatuan dan persatuan di seluruh kawasan Nusantara.
2. Mengumpulkan data dan informasi Sejarah Daerah Kalimantan Timur dengan tema Kebangkitan Nasional untuk bahan penyusunan Sejarah Nasional, yang me-

upakan Warisan Nasional dari generasi ke generasi.

3. Terkumpulnya data dan informasi Sejarah Daerah Kalimantan Timur dengan tema Kebangkitan Nasional untuk penyusunan dan penulisan Sejarah Daerah, perlu diketahui dan disebar-luaskan di daerah Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, dari generasi ke generasi.

B. M A S A L A H

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, termasuk aspek Sejarah Daerah, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, memang Kalimantan Timur untuk sementara berbobot lebih besar, hal ini disebabkan :

1. Luas daerah Kalimantan Timur meliputi $\pm 1\frac{1}{2}$ kali Pulau Jawa dan Madura, dengan luas daratan 211.440 km² dan lautan 120.000 km².
2. Kondisi alamiah sulit untuk dikunjungi dengan mudah, cepat dan murah; 85% daerahnya ditutupi hutan tropika, berbukit-bukit dan berawa-rawa. Lalu lintas kebanyakan melalui sungai. Di Kalimantan Timur sungai berjumlah 169 batang, dengan panjang keseluruhannya meliputi 12.074 km dengan daerah a-

liran seluas 12.032 km². Letak kampung yang jumlahnya 1.057 buah itu satu sama lain berjauhan dan ada kalanya dihubungkan dengan jalan setapak. Jalan raya termasuk yang ada di kota-kota di seluruh Kalimantan Timur hanya ada 2.746,5 km, sedangkan lapangan udara hanya ada 4 buah.

3. Terbatasnya sumber-sumber yang otentik, baik para informan maupun tulisan - tulisan, yang mengetahui dan mencatat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa masa lalu.
4. Terbatasnya waktu dan biaya untuk menjelajahi seluruh wilayah Daerah Kalimantan Timur.
5. Para informan dan sumber-sumber yang diperlukan di antaranya ada yang berada di luar daerah atau bahkan sudah meninggal.

Namun demikian tim daerah berusaha dengan semaksimal mungkin, sesuai kemampuan yang ada. Dengan demikian kalau pun di sana-sini terdapat kekurangan-kekurangan hal itu adalah suatu kewajaran yang perlu disempurnakan secara bertahap.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tema, ruang lingkup penelitian dan pencatatan aspek ini meliputi seluruh Kaliman-

tan Timur. Karena kebangkitan nasional daerah ini pada umumnya terdapat di pusat-pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, perusahaan dan perburuan yang terorganisasi, maka pokok-pokok kegiatan penelitian dan pencatatan diarahkan pada daerah Kotamadya Samarinda dengan tujuh Kecamatan, Kotamadya Balikpapan dengan empat Kecamatan, Kabupaten Kutai dengan beberapa kecamatan yang berkepentingan, Kabupaten Paser, Berau dan kemudian Bulungan.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN.

Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah aspek Sejarah, didahului oleh pengarahan dari Tim pusat kepada Tim pelaksana di daerah.

Selanjutnya oleh Tim pelaksana daerah diadakan :

1. Penelitian masalah, yang menentukan pedoman dan jadwal pelaksanaan survai lapangan.
2. Pengumpulan dan Penelitian data, dalam tahap ini diadakan :
 - a. Penelitian kepustakaan; di sini dikumpulkan data-data dan bahan-bahan yang ada dan pernah ditulis di daerah ini.
 - b. Penelitian lapangan; Tim pelaksana daerah langsung mengunjungi daerah-daerah yang bersangkutan yang telah di-

tentukan sebelumnya.

Di sini diadakan pengumpulan data, dengan jalan mengajukan/mengisi daftar-daftar kuesioner dan interviu. Informan-informan yang dipilih sedapat mungkin mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa pergerakan, di samping itu para pejabat dan pemuka masyarakat yang hendak diteliti.

3. Pengolahan data; Setelah bahan-bahan dan data-data melalui kepustakaan dan lapangan terkumpul, maka diadakanlah suatu penganalisaan dengan menggunakan metode komperatif dan deskriptif. Diadakan diskusi dan pembahasan, untuk mendapatkan hasil perumusan penelitian itu.
4. Penyusunan laporan; Dari hasil diskusi dan pembahasan itu disusunlah laporan sesuai dengan kerangka laporan yang telah digariskan. Diadakan diskusi dan pembahasan untuk mendapatkan hasil perumusan penelitian itu.

E. HASIL AKHIR.

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerjasama antara berbagai pihak. Naskah aslinya digarap oleh suatu Tim penyusun di Kalimantan Timur,

yang penggarapannya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurnaan dan penelitian bersama, baik oleh Tim dari Pusat (P3KD) maupun oleh Tim penyusun di Kalimantan Timur.

Hasil penyempurnaan dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiatannya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu materi atau bahan,*kebahasaan dan pendekatan. Segi materi didasarkan pada hasil penilaian, sedang segi kebahasaan diperhatikan beberapa hal seperti : ejaan, istilah dan keterbacaan. Dalam menulis naskah sejarah daerah, kiranya pendekatan regiosentris merupakan cara wajar dan dari naskah ini dapatlah dikemukakan bahwa para penyusun sudah berusaha mendekati permasalahannya dengan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai pembuka jalan atau perintisan ke arah penelitian dan penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang le-

bih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran.

Perlu juga dikemukakan, bahwa meskipun didalam naskah ini hal-hal mengenai sejarah nasional masih kelihatan agak jelas, namun hendaknya dilihat, sebagaimana dikemukakan oleh Tim penyusunnya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang peristiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahan. Sebaiknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang berguna untuk menyusun sejarah nasional pada masa Kebangkitan Nasional. Hasil akhir ini secara keseluruhan dapat dipandang sebagai sesuai dengan Terms of Reference sebagaimana dijabarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

--oOo--

B A B II.

KEADAAN DI DAERAH PADA AKHIR ABAD KE-19

A. P E M E R I N T A H A N.

Menjelang akhir abad ke-19 kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda hampir meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita telusuri maka pemusatan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dimulai pada kurang lebih awal abad ke-18, yaitu ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan VOC ke pemerintah Hindia Belanda.

Dalam masa akhir abad ke-19 ini pengaruh Eropa terutama sekali pengaruh bangsa Belanda tidak saja terbatas di pulau Jawa, tetapi sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan tidak hanya di kota-kota, tapi sudah sampai ke pelosok-pelosok.

Agaknya keharusan Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai seluruh kepulauan Nusantara ini, erat hubungannya dengan situasi Eropa pada saat itu. Pada abad ke-18 bergejolaklah Revolusi Industri di Eropa terutama di negeri Inggris. Barang-barang industri yang dihasilkan dalam jumlah besar itu sudah tidak dapat ditampung lagi oleh pasar-pasar di negara-negara Eropa.

Kelebihan produksi yang dialami oleh negara-negara industri ini menyebabkan mereka mencari pasar di luar negaranya sendiri.

Demikianlah kapitalisme di negara Belanda yang berkembang pesat pada ke ke-19 itu, mengalihkan kegiatannya ke tanah jajahan Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan politik dan perekonomian yang terjadi di Indonesia dalam abad ke-19 itu sebagian besar terjadi atas dorongan kaum kapitalis.

Kelihatannya penguasaan seluruh kepulauan Nusantara ini secara sistematis dimulai pada abad ke 19.

Pada tahap pertama golongan kapitalis yang menanamkan kekuasaannya di Indonesia ini bertentangan dengan kekuasaan Feodal Indonesia. Kemudian dengan liciknya golongan kapitalis ini berbalik merangkul golongan Feodal Indonesia dan menjadikannya alat untuk melaksanakan keinginannya. Kini kedua golongan itu hidup berdampingan, sebaliknya rakyat Indonesia hanya menyerahkan nasibnya karena tidak ada lagi yang dapat melindunginya.

Demikian juga halnya penguasaan Pemerintah Hindia Belanda di Daerah Kalimantan Timur juga mempergunakan cara-cara seperti tersebut di atas.

Dengan berbagai perjanjian, ikatan-ikatan dan sedikit embel-embel penghormatan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda satu demi satu kesultanan yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Kesultanan Kutai Kertanegara di Kutai, Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung di Berau, Kesultanan Bulungan di Bulungan dan Kesultanan Pasir Belengkong di Pasir, pada akhir abad ke-19, semuanya berada di bawah pengaruh Pemerintah Hindia Belanda.

Alat-alat pemerintahan feodal mulai yang terendah yaitu Petinggi, Kiayi/Penjawat, Kepala Penjawat, Mangkubumi beserta Dewan Kerajaan sampai dengan Sultan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak diganggu gugat. Malahan kekuasaannya dipertegas lagi. Untuk memelihara hubungan Pemerintah Belanda dengan Sultan-Sultan ini maka ditempatkannya ialah residen-residen atau asisten residen; penempatan tersebut tergantung pada besar kecilnya pandangan Pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah tersebut.

Sampai menjelang abad ke-20 Oost Borneo termasuk dalam wilayah Kalimantan Selatan, residenya berkedudukan di Banjarmasin. Sedangkan untuk daerah Oost Borneo ditempatkan 2(dua) asisten residen masing-masing di Samarinda dan di Tarakan.

Kemudian asisten residen ini membawahi langsung kesultanan-kesultanan di daerah Oost Borneo.

Asisten residen yang berkedudukan di Samarinda membawahi kesultanan Kutai dan Pasir Balengkong, sedangkan Asisten residen Tarakan membawahi kesultanan Gunung Tabur, Sambaliung dan kesultanan Bulungan.

Untuk mengontrol hubungan langsung antara Pemerintah Hindia Belanda dengan para sultan, di daerah tersebut ditempatkanlah controleur-controleur. Mengenai penempatan dan jumlah controleur ini pun tergantung pada besar kecilnya pandangan Pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah kesultanan tersebut.

Demikianlah pada waktu itu terdapatlah controleur-controleur orang Belanda yang ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Untuk daerah Oost Borneo pada waktu itu terdapatlah controleur masing-masing :

1. Di kesultanan Kutai; karena luasnya Pemerintah Hindia Belanda menempatkan 3(tiga) controleur, yaitu di Tenggarong, Samarinda, dan Balikpapan.
2. 1 (satu) controleur di kesultanan Pasir Balengkong berkedudukan di Tanah Grogot.
3. 1 (satu) controleur untuk kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung berkedudukan di Tanjung Redeb.

4. 1 (satu) controleur untuk kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Selor.

Keadaan bidang eksekutif seperti yang kita bicarakan tadi tidaklah terlepas dari kekuasaan yudikatif. Sebenarnya tiap kesultanan di daerah Kalimantan Timur jauh sebelum kedatangan bangsa Barat telah memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri yang sebagian besar bersumber pada hukum Islam ditambah dengan peraturan adat setempat.

Kemudian dengan jatuhnya kekuasaan mereka di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan-perubahan tetapi tanpa mengubah seluruhnya.

Maka di bidang Pengadilan diadakan dua macam kerapatan, yaitu Kerapatan Besar dan Kerapatan Kecil. Kerapatan Besar memutus perkara-perkara pidana dan perdata besar, sedang Kerapatan Kecil memutuskan perkara pidana dan perdata kecil.

Kekuasaan seorang aparat Pemerintah Hindia Belanda sangat luas dan mutlak. Misalnya seorang Kiai/penjawat memegang tampuk kekuasaan eksekutif dan yudikatif di daerah kekuasaannya. Ia seorang pemimpin pemerintah, pimpinan pengadilan, pemimpin bidang pertanian dan kehutanan, dan me-

rupakan Menteri Polisi yang bertanggungjawab di bidang keamanan.

Mengingat absolutnya kekuasaan seorang aparat pemerintah, maka keadaan rakyat dalam wilayah kekuasaan seorang penguasa tergantung kepada kemampuan dan mental seorang penguasa. Suatu daerah dibawah kekuasaan seorang penguasa yang berkemampuan dan kepribadian baik, akan terwujudlah di daerah tersebut suatu masyarakat yang aman dan tenteram dan penuh dengan kegairahan; sebaliknya keadaan masyarakat menjadi resah, gelisah apabila berada dibawah kekuasaan seorang yang berkemampuan dan bermental tidak baik.

B. SOSIAL BUDAYA (PENDIDIKAN, SENI BUDAYA).

Penekanan pembicaraan dalam Sub. Bab Sosial budaya keadaan Kalimantan Timur dalam periode akhir bada ke-19 ialah keadaan pendidikan dan seni budaya. Sebagai akibat Politik Etis yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1870 yaitu politik yang merupakan reaksi terhadap Cultuur Stelsel, maka angin pembaharuan ini pun dapat dirasakan oleh daerah Oost Borneo.

Kalau kita kembali membalik-balik sejarah Politik Etis, maka kita tidak mungkin melupakan nama nama seperti Eduard Douwes Dekker, Baron Van Hoe-

vel dan Conrad Theodore Van Deventer. Mereka adalah orang Belanda, tetapi memiliki rasa perikemanusiaan yang tinggi. Tujuan Politik Etis tersebut diformalisasikan dengan nama Trilogi Van Deventer, yaitu Irigasi, Emigrasi dan Edukasi.

Sebagai idee an sich Trilogi ini baik, tetapi ternyata oleh golongan kapitalis yang banyak mendapat dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda telah dikorup untuk kepentingan mereka sendiri. Khusus mengenai keadaan edukasi atau pendidikan menjelang akhir abad ke-19 di daerah ini masih langka sekali. Sebaliknya pendidikan yang berpola pada pendidikan keagamaan terutama agama Islam sudah dikenal berabad-abad bersamaan dengan masuknya agama tersebut ke daerah ini.

Seperti kita ketahui belajar membaca dan menulis serta menuntut ilmu lainnya bagi orang Islam sangat dianjurkan dan dianggap sebagai perbuatan yang berpahala. Dengan demikian tulisan Arab Melayu menjadi alat komunikasi dalam masyarakat pribumi pada waktu itu. Baru pada permulaan abad ke-20 didorong oleh kebutuhan yang makin mendesak dan seiring dengan makin dalamnya pengaruh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah ini, apalagi daerah-daerah lainnya sudah lama melaksa-

nakannya, maka pemerintah mendirikan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah itu misalnya H I S yaitu sekolah rendah berbahasa Belanda; itu pun terbatas pada kota-kota tertentu dan dikunjungi oleh anak-anak tertentu pula.

Untuk rakyat biasa dibangun sekolah Bumi Putra 3 tahun, yang kemudian didirikan untuk seluruh daerah kepenjawatan di daerah ini. Jenis sekolah semacam inilah pada permulaan abad ke-20 dapat didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang jumlahnya sangat terbatas.

Memberikan ilustrasi mengenai masalah pendidikan ini agaknya pengadaan pendidikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, bukanlah semata-mata memenuhi tuntutan dalam Trilogi Politik Etis tersebut. Agaknya ada atau tidak ada anjuran itu, pemerintah toh tetap mengadakannya kebutuhan akan tenaga administrasi untuk melayani sistem pemerintahan yang makin membesar. Itulah yang mendorong Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pendidikan tersebut.

C. KEHIDUPAN EKONOMI.

Bersamaan dengan semakin mendalamnya pengaruh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah ini masuk pulalah pengaruh ekonomi Eropa ke pelosok -

pelosok daerah ini. Jika sebelumnya jual beli dengan sistem uang hanya terbatas pada kota-kota penting saja sedangkan di pelosok-pelosok masih memakai sistem barter, maka sekarang jual beli sistem uang sudah sampai ke pelosok-pelosok. Rakyat pedalaman sekarang sudah mengenal nilai barang dan nilai jasa. Obyek usaha di daerah ini sebagian besar diarahkan ke bidang pertambangan dan hasil hutan.

Investasi modal di bidang pertambangan, terutama ialah pertambangan batu bara dan minyak, sehingga terdapatlah pertambangan minyak di Anggana, Sanga-sanga, Tarakan dan Pulau Bunyu. Sedangkan Balikpapan merupakan kota penyulingan minyak yang terbesar sebelum Perang-Dunia ke-II.

Bataafsche Petroleum Maatschappij (B P M) adalah perusahaan minyak tunggal di Kalimantan Timur pada waktu itu, sedang pertambangan batu bara dikenal sebagai perusahaan Batu Bara O B M (Oost Borneo Maatschappij) yang mengusahakan pertambangannya di Palaran, Loa Kulu dan SMP (Steepkolen - Maatschappij Perapatan) mengusahakan pertambangannya di Teluk Bayur (Kabupaten Berau).

- Perlu pula diketahui bahwa perusahaan minyak B P M sebelum mencapai bentuknya seperti yang

kita kenal pada waktu peleburannya menjadi Per -
tamina, memulai sejarahnya dari perusahaan swas-
ta Asing SS Samuel Shellene bersaudara keturunan
Yahudi berwarganegara Inggris yang berhasil
mengeksplorasi sumber-sumber minyak di daerah Ka-
limantan Timur. Selain SS Samuel Shellene ber-
saudara ini terkenal pula nama-nama JH. Menten
dan Baron van Russel sebagai pengusaha-pengusaha
swasta Asing pada waktu itu. Kemudian pada ta-
hun 1907 perusahaan swasta Asing ini dijual ke -
pada Pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian
perusahaan minyak tersebut kini di bawah penga -
wasan Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam perkembangan selanjutnya perusahaan mi-
nyak B P M ini memiliki authority yang besar se-
kali seolah-olah menyaingi kekuasaan pemerintah
setempat. Eksploitasi di bidang tradisional Pe-
merintah Hindia Belanda tidak langsung mengusa -
hakannya. Untuk ini mereka serahkan pada pengu-
saha Cina.

Kalau kita pelajari, Pemerintah Hindia Belan-
da dalam usahanya menguasai dan mengeksploitasi
bumi Kalimantan Timur ini menggunakan sarana :
pranata golongan feodal dan golongan pengusaha
Cina. Golongan feodal dipergunakannya untuk ke-
pentingan politik dan ekonomi, sedangkan golong-

an Cina dipergunakan untuk kepentingan ekonomi.

D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN.

Kalau di bidang politik dan ekonomi menjelang akhir abad ke-19 Pemerintah Hindia Belanda telah berhasil masuk sampai ke pelosok-pelosok daerah Oost Borneo, tidak demikian halnya dengan perkembangan alam fikiran (intelektual) dan kepercayaan. Perkembangan alam fikiran (intelektual) yang berpola pada intelektual Barat sampai akhir abad ke-19 di daerah ini sangat terbatas. Itu pun hanya pada orang Belanda dan satu dua orang dari kalangan bangsawan, pemuka-pemuka masyarakat tertentu dan intelektual.

Pola pikiran intelektual Barat yang mempunyai ciri antara lain : bebas, berorientasi ke masa depan, ratio menjadi pegangan segala-galanya, oleh pemerintah Hindia Belanda tidak pula diusahakan - untuk menyebarkannya ke dalam kalangan penduduk.

Sebaliknya penduduk pribumi tidak pula tertarik dengan apa yang menjadi cap kebudayaan orang-orang Barat ini. Orang-orang pribumi yang kejangkitan kebudayaan Belanda tidak pula menaikkan derajat dalam pandangan rakyat pribumi, malah menjadi ejekan.

Kekalahan mereka di bidang politik dan ekonomi menyebabkan mereka mengisolasi diri untuk masuk dalam lingkungan kebudayaan yang berpola pada kebudayaan Islam ditambah dengan kebiasaan tradisi yang dipusakai mereka. Itu pula sebabnya sampai berakhirnya Pemerintah Hindia Belanda di Nusantara ini agama Kristen yang juga menjadi simbol orang-orang Barat pada waktu itu tidak dapat berkembang di wilayah ini, terkecuali pada daerah daerah pedalaman.

Ada semacam motto dalam kalangan orang-orang pribumi pada dewasa itu : mereka boleh kehilangan kekuasaan, kekayaan atau kehilangan segala-galanya, tetapi tidak dalam kepercayaan atau keyakinan dalam beragama. Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam masa-masa permulaan abad ke-20 pendidikan yang diintroduksi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini bukanlah hal yang harus diharamkan benar.

Pemuda-pemuda kita masa itu dengan sangat cerdiknyanya memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Kaum terpelajar inilah yang kemudian menjadi penggerak Kebangkitan Nasional yang menggoyahkan Pemerintah Hindia Belanda.

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN + 1900-1928

A. PENGARUH POLITIK ETIKA DI DAERAH

Pengaruh politik etika atau politik kesusilaan/kemakmuran lazimnya disebut politik kesusilaan, yakni edukasi, irigasi dan transmigrasi lambat laun terasa juga di daerah. Dari pihak pemerintah Belanda sendiri politik etika tersebut lambat dikembangkan ke daerah, namun rakyat di daerah menanggapi sangat serius, terutama oleh pemikir-pemikir yang berjiwa nasional yang jumlahnya terbatas sekali pada zaman itu.

1. E d u k a s i.

Baru pada tahun 1915 di beberapa tempat di Kalimantan Timur didirikan Inlandse School (Sekolah Pribumi). Kemudian pada tahun 1916 didirikan pula E L S (Europese Lagere School), khusus untuk anak-anak bangsa Belanda saja. Pada permulaan berdirinya E L S kepada anak-anak Indonesia masih diberi kesempatan bersekolah dengan syarat minimal orang tuanya sudah mencapai gaji F. 100,- (Seratus rupiah Belanda). Dapat dibayangkan hanya beberapa orang Indonesia yang berkesempatan menyekolahkan anaknya di E L S. Kesempatan belajar ba-

gi anak Indonesia yang dapat memenuhi persyaratan, itu pun tidak berlaku lama, terkecuali bagi orang tuanya yang gelijkgesteld atau anak dari golongan ningrat.

Atas inisiatif beberapa orang pemuka rakyat yang berjiwa kebangsaan, dan menghayati betapa besar dan pentingnya arti pendidikan bagi bangsa yg dijajah, dalam tahun 1923 di Samarinda didirikan H I S (Holands Inlandsche School) partikulier, salah seorang tokohnya yang terkenal bernama Masdar.

Kemudian sekitar tahun 1928 dibentuk pula sejenis sekolah H I S yang dipimpin oleh Ibu Aminah Syukur. Beliau ini sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Samarinda, sehingga ketika beliau meninggal dimakamkan di Taman Pahlawan Kesuma Bangsa Samarinda, dan nama beliau diabadikan pada salah satu jalan di Samarinda.

Di Tarakan atas inisiatif pemuka-pemuka rakyat didirikan H I S Partikelir; yang masuk H I S partikelir itu adalah anak-anak Indonesia dan anak-anak Cina peranakan. Untuk anak-anak Cina tolok disediakan sekolah khusus bernama Chung Hua - Cung Hui, yang didirikan atas swadaya masyarakat Cina tolok itu sendiri.

Untuk mengimbangi adanya E L S yang khusus

bagi Belanda dan golongan ningrat, beberapa tokoh masyarakat, antara lain Sayuti Lubis, ex. Jaksa Anang Acil, Kamaluddin dan M. Sidik (orang-orang tersebut tidak terikat oleh suatu organisasi apa pun), pada tahun 1926 mengadakan Rapat atau Openbare Vergadering, tujuannya menuntut kepada pemerintah supaya di Kalimantan Timur :

- a. Dalam waktu yang singkat sudah dapat didirikan Gouvernement H I S untuk anak-anak Indonesia.
- b. Segera didirikan Algemene Volkscrediet Bank guna membantu pengembangan permodalan usaha rakyat banyak.

Selain tuntutan di atas, mereka mengutuk rodi /poenale sanctie yang dipaksakan kepada bangsa Indonesia, seperti di Jawa dan Sumatera. Dengan adanya tuntutan tersebut, pada tahun 1928 pemerintah mendirikan H I S di Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong.

Tidak lama sesudah berdirinya H I S didirikan pula H C S (Hollands Chinese School) khusus untuk Cina peranakan. Selain dari E L S, H I S dan H C S ada pula Volkschool dan Vervolgschool di tiap kecamatan.

Untuk meningkatkan pendidikan dan guna menda-

patkan tenaga guru dari penduduk daerah sendiri di sediakan C V O (Cursus Voor Onderwijzers) di-Tenggarong. Umumnya para pelajar dari C V O yang ingin meneruskan ke Normaal School berangkat ke-luar daerah; yakni ke Makassar (sekarang Ujung - Pandang). Demikian pula lulusan E L S, H I S dan H C S, jika ingin meneruskan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya M U L O (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) harus ke Banjarmasin, Makassar atau Surabaya, karena pada waktu itu di Kalimantan Timur belum ada sekolah menengah.

2. I r i g a s i

Kecuali yang bertempat tinggal di sepanjang pantai dan kenohan (danau) sebagai nelayan dan di kota-kota sebagai pegawai dan pedagang, sebagian besar penduduk Kalimantan Timur, terutama yang jauh bermukim di pedalaman adalah petani. Sistem bertani yang mereka lakukan ialah dengan cara menebang dan membakar hutan, kemudian tahun selanjutnya berpindah lagi dengan menebang dan membakar di tempat yang baru, sedang tempat yang lama ditinggalkan begitu saja. Dengan cara demikian menyebabkan makin meluasnya kerusakan hutan dan makin meluasnya padang alang-alang. Tanah menjadi miskin zat hara, sehingga menim-

bulkan erosi dan banjir.

Tingkat hidup peladang yang selalu berpindah itu pada umumnya sangat rendah sehingga tidak dapat diharapkan hasil produksinya meningkat. Petani yang tinggal di daerah rawa/rapak tergantung penuh kepada curah hujan. Pada umumnya peladang pindah atau petani di daerah rawa/rapak sistem bertaniya masih sederhana, mewarisi kebiasaan orang-orang yg terdahulu secara turun temurun. Pemerintah Belanda sendiri belum ada atau boleh dikatakan tidak ada perhatian dan usaha untuk meningkatkan lapangan pertanian ke arah modernisasi, seperti membuat irigasi dan sebagainya.

Salah seorang kepala daerah Kesultanan Kalimantan Timur, yang menaruh perhatian terhadap sistem pertanian modern adalah Sultan Kutai yang bernama A.M. Parikesit. Sultan Kutai tersebut mendatangkan orang Bali ke daerah Kutai untuk mengajar para petani, bagaimana cara bertani yang modern dengan membuat irigasi dan sebagainya, karena orang Bali pada waktu itu dikenal sebagai salah satu suku bangsa Indonesia yang ahli membuat irigasi. Ternyata setelah diadakan sistem pertanian yang lebih maju, produksi tani meningkat jauh dari sebelumnya.

3. Transmigrasi.

Sedangkan mengenai transmigrasi pada zaman sebelum kemerdekaan belum ada, meskipun daerahnya sangat luas dan penduduknya yang relatif kecil jumlahnya. Transmigrasi pertama yang dilakukan di Kalimantan terjadi sekitar tahun 1955, didatangkan dari pulau Jawa.

B. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERDIRINYA PARTAI/ORGANISASI

Terlebih dahulu perlu dikemukakan, bahwa di daerah Kalimantan Timur, pada periode 1900 - 1928 belum terlihat tumbuhnya suatu kegiatan kebangkitan nasional yang bersifat khas daerah ataupun suatu organisasi yang muncul di daerah itu sendiri. Tetapi pada masa itu di Kalimantan Timur, sudah berkoor suatu semangat di dalam masyarakatnya untuk bergerak menjadi bangsa yang memiliki Tanah Air yang merdeka. Semangat ini sudah ada jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945. Kiranya semangat ini dapat dinilai sebagai embrio dari pertumbuhan kebangkitan nasional.

Tanpa adanya semangat kemerdekaan itu, sukar di gambarkan mengapa gerakan-gerakan atau pun berbagai organisasi politik dan sosial yang berhaluan nasional, dapat tumbuh di dalam masyarakat Kalimantan Timur dan mendapat tanggapan dan sambutan yang

hangat. Dengan masuknya kegiatan kebangkitan nasional ini, maka semangat kebangsaan di dalam masyarakat Kalimantan Timur memperoleh saluran yang positif.

1. Sarekat Islam

Organisasi yang pertama tumbuh di Samarinda adalah S I (Sarekat Islam) pada tahun 1917. Cabang-cabangnya terdapat di beberapa tempat di Kalimantan Timur, anggotanya berjumlah lebih dari sepuluh ribu orang. Pengurusnya antara lain H. Abd. Manap, M. Yusuf Arief, Kamaluddin dan Y.M. Halid. Y.M. Halid pernah dikirim ke Jawa selaku utusan S I daerah untuk menghubungi H.O.S. Cokroaminoto (Ketua Umum S I Pusat), dalam hubungan pengembangan organisasi S I di daerah Kalimantan Timur.

Dengan adanya organisasi ini menunjukkan, bahwa rakyat daerah ini pada waktu itu sudah mengenal cara berorganisasi dalam memperjuangkan kebaikan sosial ekonominya. S I dalam menjalankan dan mengembangkan organisasinya membantu bagian pemudanya dengan diberi nama J.M. (Young Mohammadan). Organisasi pemuda ini aktif di bidang olah raga dan musik, di samping mendidik anggotanya untuk memperdalam ajaran agama Islam.

Untuk membiayai organisasi S I mendirikan se-

buah toko yang mereka namakan "Syarikat Dagang Islam" yang dibuka untuk umum. Kegiatan lainnya mengadakan pasar malam, hasilnya dipergunakan membeli gedung S I, salah satu gedung yang termegah pada waktu itu di Samarinda, yang kini menjadi gedung P S I I terletak di Jalan Panglima Batur sekarang ini.

2. M u h a m m a d i y a h

Muhammadiyah didirikan pada tahun 1925, pengurusnya antara lain H. Abd. Manap dan M. Siddik. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam, tidak berpolitik, aktif mengembangkan organisasinya dengan mendirikan cabang-cabangnya di mana-mana. Salah satu cara pembentukan kader dengan mendirikan kepanduan H W (Hizbul Wathan). Seperti S I Muhammadiyah pernah mencari keuangan dengan mengadakan pasar malam amal.

Masuknya Muhammadiyah membawa modernisasi dalam melaksanakan ibadah yang dinamakan "kaum muda"

3. Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama berdiri pada awal tahun 1925. Pendiri N U di Kalimantan Timur, adalah H. Abdusamad dan Abd. Madjit. Kemudian pengurus dipercayakan kepada K.H. Abdullah Marisi, H. Ismail dan

H. Abd. Gani. Pemudanya dihimpun dalam kepanduan - "Anshor". N U pun giat mengembangkan organisasinya, mengembangkan ajaran agama Islam. N U dalam melaksanakan ibadah adalah secara tradisionil sebagaimana disebut "kaum tua".

C. KEADAAN DI DAERAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 - 1918).

1. Sikap Pemerintah Belanda

Perang Dunia I (1914 - 1918) yang sedang berkecamuk di Eropa tidak mempengaruhi kepada pemerintahan atau sikap Pemerintah Hindia Belanda di Daerah. Demikian pula dengan didirikannya Volksraad oleh Belanda pada tahun 1918, yang tugasnya hanya memberi nasihat kepada pemerintah dan tidak mengikat serta jauh sekali untuk dapat menjatuhkannya, pada periode itu tidak ada mempunyai efek apa-apa di daerah, terkecuali jauh pada tahun-tahun kemudiannya baru ada tuntutan rakyat melalui partai-partai politik; yakni "Indonesia Berparlemen".

2. Keadaan Masyarakat (Ekonomi-Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama)

a. Sosial - ekonomi.

Keadaan sosial ekonomi atau kehidupan bangsa Indonesia, pribumi sebagai bangsa yang dijajah sudah

jelas sebagian besar hidupnya melarat, sesuai dengan apa yang dikatakan Belanda, bahwa bangsa Indonesia cukup hidupnya dengan penghasilan "sebenggol" (F.0,025) sehari, terkecuali sebagian kecil yang mendapat kedudukan sebagai ambtenaar di pemerintahan atau yang menjadi pegawai di beberapa perusahaan Belanda, seperti di B P M (Betaafse Petroleum Maatschappij), di Tambang Batubara O B M (Oost Borneo Maatschappij). Dalam ukuran bangsa kita kehidupan mereka jauh lebih baik walaupun masih di bawah rata-rata kehidupan bangsa Belanda.

Kewajiban terhadap pemerintah cukup berat dirasakan oleh rakyat, sedangkan penghasilan jauh di bawah penghasilan minimal. Bagi rakyat yang tidak mampu membayar pajak, langsung dikenakan kerja membersihkan jalan-jalan yang disebut Erakan, yaitu kerja yang dilakukan sebagai ganti pembayaran pajak.

Kehidupan pribadi sebagian besar tergantung kepada bercocok tanam, bersawah dan berladang, mengumpulkan hasil hutan, seperti rotan, damar, sarang burung, mencari ikan dan berburu. Barang-Barang hasil bumi yang diperoleh dijual kepada perusahaan dagang, misalnya kepada eksportir Jerman dan kemudian kepada perusahaan Belanda, N.V. BORSUMIJ (Borneo Sumatra Handel Maatschappij) atau kepada

pedagang-pedagang Cina,

Bagi penduduk Kalimantan Timur lainnya yang terdiri dari bangsa Cina totok maupun peranakan, India dan Jepang, kehidupannya jauh lebih baik dari pribumi sendiri. Terutama orang-orang Cina, baik yang totok maupun peranakan umumnya menjadi pedagang baik besar dan menengah sampai kepada pedagang kelontongan. Mereka ini hidup bukan di kota-kota saja, bahkan sampai di udik-udik di pedalaman. Peribahasa mengatakan : Di mana ada asap di sana ada Cina.

Orang-orang India kebanyakan berdagang kain dan orang-orang Jepang selain membuka toko serba ada (ukuran pada masa itu), toko "N.A.B." di kota-kota besar di Kalimantan Timur yakni di Samarinda dan Balikpapan, juga ada yang berusaha membuka photo studio, bahkan perusahaan besarnya bergerak di bidang perkayuan, seperti N.R.K. (Nanyo Rinjo Kaisha) beroperasi di Sangkulirang dan perusahaan Kayu Jepang lainnya di Tarakan.

b. P e n d i d i k a n

Sebagaimana yang sudah dikemukakan terdahulu, bahwa mengenai pendidikan ketika itu hanya ada tingkat S D, sedangkan tingkat menengah belum ada. Yang dapat memasuki E L S hanya anak-anak yang orang tuanya berada, kalangan ningrat dan keluarga

kesultanan yang ada di Kalimantan Timur.

Dan sudah jelas pendidikan dan peraturannya yang ada diuruskan untuk kepentingan Pemerintah Belanda belaka.

c. B u d a y a.

Kebudayaan Barat hanya mempengaruhi kehidupan golongan ningrat dan pegawai. Oleh karena itu tampak adanya jurang yang memisahkan antara golongan ningrat bersama pegawai di satu pihak dan rakyat biasa di lain pihak.

Pada hari-hari besar Belanda, khususnya pada tiap tanggal 31 Agustus, hari perayaan lahirnya raja Belanda, bangsa Belanda merayakannya di kota-kota besar di Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, di tempat yang terdapat konsesi perusahaan Belanda antara lain di Loa Kulu dan Sanga-sanga.

Kadang-kadang hari-hari besar Belanda dirayakan dengan mengadakan dansa-dansa di perusahaan-perusahaan dan di keraton-keraton, terutama di keraton Sultan Kutai, karena Keraton Sultan di Tenggarong lebih memenuhi persyaratannya dibanding dengan Keraton Sultan-Sultan lainnya.

Meskipun bangsa Cina banyak tinggal di Kalimantan Timur, tapi kebudayaannya tidak sampai mem-

pengaruhi rakyat setempat. Berbeda dengan di Jakarta misalnya pengaruh kebudayaan Cina dan bangsa-bangsa lainnya banyak kelihatan, seperti dalam adat perkawinan dari Arab dan musik Tanjidor dari Portugis.

Kebudayaan daerah sendiri pada dasarnya masih murni, terutama seni tari di kalangan penduduk asli pedalaman. Tari-tarian yang dibawakan oleh suku-suku asli pemilik tarian itu sendiri, seperti oleh suku Kenyah, Bahau dan lain-lainnya masih tetap dipertahankan mereka.

d. A g a m a

Orang-orang Islam banyak bertempat tinggal di kota-kota dan di sepanjang pantai, dan perkembangan agama Islam semakin meluas. Kadaan ini terutama disebabkan berdatangnya beberapa orang ulama atau muballigh dari luar daerah ke daerah, selain mengadakan ceramah dan pengajian agama, juga memelopori mendirikan sekolah Islam.

Penduduk pedalaman yakni penduduk asli, terdiri dari suku Kenyah dan Bahau pada umumnya penganut animisme. Di tengah-tengah penganut animisme itulah pastor-pastor dan pendeta-pendeta membangun agamanya. Yang terbesar adalah agama Protestan. Dibanding dengan kedua aliran Kristen itu

penyebaran agama Islam di kalangan penganut animisme jauh ketinggalan.

Di kalangan umat Islam sendiri dengan adanya Muhammadiyah yang disebut "kaum muda" menimbulkan perselisihan paham dengan golongan yang menyebut dirinya "kaum tua", yang dipelopori oleh Nahdhatul Ulama. Namun lambat laun antara keduanya timbul kesadaran, sehingga perselisihan paham yang ada mulai berkurang.

Kepercayaan yang dianut oleh orang Cina, apakah ia totok atau peranakan pada masa itu umumnya adalah Kong Hu Cu, aliran tersebut berkembang hanya di kalangan bangsa mereka sendiri.

---oOo---

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928-1942.

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA
TAHUN 1930

Pada umumnya Pemerintah Hindia Belanda tidak banyak mengalami kesulitan dalam menanamkan pengaruh politiknya di Kalimantan Timur. Daerah ini merupakan daerah-daerah Kerajaan yang berpemerintahan sendiri yang dalam bahasa Belanda disebut Zelfbestuur atau Landschap.

Kerajaan-kerajaan itu, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Berau, Kerajaan Bulongan dan Kerajaan Pasisir. Masing-masing Kerajaan mempunyai peraturan dan perundang-undangan sendiri. Sebagai contoh kita ambil kerajaan Kutai, Kerajaan ini dalam memutuskan perkara pidana dan perdata di wilayah hukumnya mempergunakan dua jenis peradilan yaitu Kerapatan Besar dan Kerapatan Kecil. Kerapatan Besar mengadili perkara seperti pembunuhan, perampokan dan Kerapatan Kecil seperti pencurian kecil dan sebagainya.

Sepintas lalu secara formal kerajaan-kerajaan itu mempunyai pemerintah sendiri, tetapi kenyataan

nya tidak demikian. Pemerintahan kerajaan ditentukan dan dikendalikan oleh Belanda melalui controleur yang ditempatkan di kerajaan itu. Sebab semua peraturan yang dilaksanakan dan pengangkatan seorang pejabat pada tingkat kecamatan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari controleur.

Pada saat itu Kalimantan Timur diperintah oleh dua orang Asisten Residen yang berkedudukan di Samarinda dan Tarakan, sedang Residenya berkedudukan di Banjarmasin. Untuk mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Kerajaan ditempatkanlah controleur-controleur. Jadi ada controleur di Bulongan, di Berau, di Pasir dan di Kutai. Khusus untuk Kutai berhubungan dengan luas daerahnya ditempatkan empat controleur yaitu di Balikpapan, Tenggarong, Samarinda dan Boven Mahakam di Long Iram.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa dengan adanya pemerintahan sendiri oleh Kerajaan yang diawasi para Controleur itu sebenarnya adalah suatu bentuk tersendiri yang dilakukan oleh penjajah dalam usaha menguasai kerajaan itu beserta rakyatnya. Dengan perkataan lain rakyat dijajah melalui pemerintahan kerajaannya itu sendiri.

Bahkan dalam kenyataannya pemerintah kerajaan yang diperalat oleh penjajah itu, kadang - kadang

bersikap lebih reaksioner terhadap rakyatnya, khususnya terhadap kaum pergerakan. Sebagai contoh di daerah kerajaan Kutai hampir tidak berkembang organisasi-organisasi pergerakan. Bukan saja organisasi pergerakan, bahkan organisasi agama pun mendapat perlakuan yang sama. Untuk mengadakan tablig agama saja harus meminta izin terlebih dulu kepada Raad Agama di Tenggarong.

Sedang di Samarinda misalnya, atau di tempat-tempat lain yang berstatus sama dengan Samarinda, yang disebut Governements bestuursgebied hak bersekut berorganisasi/berkumpul dan bersidang cukup terjamin. Dalam tahun tiga puluhan di Samarinda dan Balikpapan timbul cabang-cabang "Persatuan Bangsa Indonesia" yang kemudian menjadi PARINDRA, dalam tahun 1934. Dan dalam tahun 1937 disusul oleh cabang-cabang Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Dari gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan timbul cabang Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dan Musyawarawatut Thalibin (yang berpusat di Banjarmasin). Tetapi sebaliknya di daerah yang disebut Zelfbestuur atau Landschap, terutama di kerajaan Kutai bidang Pendidikan lebih baik keadaannya. Sebagai contoh H I S (Sekolah rendah berbahasa Belanda untuk rakyat) jauh lebih dulu didirikan di Tenggarong sebagai Ibu Kota Kerajaan Kutai daripada di

Samarinda. Sebagai tempat kedudukan Asisten-Resi - den Belanda di Tenggarong telah ada H I S pada tahun 1913, sedang di Samarinda baru pada tahun - 1923.

Hal ini dapat kita pahami, kalau benar-benar kita memperhatikan itikad daripada penjajahan Belanda. Demi kepentingan kelanjutan penjajahannya itu sendiri, yang bersekolah adalah anak-anak bangsawan dan pegawai Kerajaan, atas biaya kerajaan pula. Mereka yang menamatkan pelajarannya di H I S meneruskan ke OSVIA dan kemudian menjadi pegawai yang terdidik.

Tetapi ada juga di antaranya yang tidak suka bekerja pada pemerintah Belanda dan tidak mau ke OSVIA. Mereka memilih sekolah-sekolah lanjutan lain. Mereka ini nanti adalah orang-orang yang berjiwa kebangsaan.

Pada tahun 1932 didirikan Pendidikan Rakyat Indonesia di Tenggarong yang pada hakekatnya merupakan badan pendidikan politik yang terselubung. Di sini diajarkan politik dengan materi brosur "Menuju Indonesia Merdeka" karangan Soekarno. Setiap hari Sabtu, sebelum pelajaran dimulai murid-murid menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan dijadikan salah satu pelajaran wajib. Di antara pengurus yang kita ketahui adalah almarhum Bambang - Abd. Rahman, Aji Bambang Mufti dan Aji Bambang Musa.

(A.R. Djokoprawiro), sedangkan gurunya di antaranya H. Imaluddin Ishak.

Pada saat-saat memuncaknya kegiatan Pendidikan Rakyat Indonesia muridnya mencapai 250 orang. Kemudian kegiatan ini diketahui oleh Belanda yang segera mengadakan penggerebegan yang dipimpin oleh controleur sendiri secara langsung pada tahun 1933, tetapi para pengurus dan guru-guru telah dapat diselamatkan lebih dulu. Lagu Indonesia Raya dinyatakan dilarang dinyanyikan lagi.

1. Politik keras terhadap gerakan non-koperasi.

Selama tahun-tahun berkecamuknya gerakan non-koperasi politik keras dari pemerintah Hindia Belanda boleh dikatakan tidak ada atau tepatnya tidak perlu dijalankan di Kalimantan Timur. Sebab partai Politik yang berasaskan non-koperasi (tidak bersedia atau menolak bekerja sama dengan pihak pemerintah jajahan), seperti P M I, Partindo dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, sampai saat dilarangnya oleh pemerintah belum mempunyai cabang di daerah ini. Ini tidak berarti bahwa, pada waktu itu tidak ada di kalangan rakyat di daerah ini, yang secara perorangan menganut politik non-koperator. Sebagai tindakan preventif terhadap timbulnya gerakan non-koperasi tersebut di Kalimantan Timur, pihak peme -

rintah Hindia Belanda melalui aparat intelegennya, yakni Politieke Inlichtingen Dienst (PID) selalu bertindak cepat bilamana timbul suara-suara yang keras menentang penjajahan.

Suara-suara yang keras ini oleh pihak Belanda diperdengarkan oleh koran nasional yang terbit di daerah ini. Koran nasional yang dimaksudkan ini ialah mingguan "Panggilan Waktoe" dipimpin oleh H. Siregar, seorang pemuda revolusioner yang dari namanya dapat diketahui berasal dari Tapanuli. Boleh dikatakan setiap terbit "Panggilan Waktoe" terkena ranjau pers (persdelict), yang menyebabkan penanggung jawabnya (H. Siregar) selalu berurusan dengan pengadilan (landraad), baik karena tuduhan penghasut maupun karena tuduhan menghina Pemerintah Hindia Belanda atau aparturnya.

H. Siregar sebenarnya adalah anggota Parindra, bahkan dia termasuk di antara beberapa orang yang mula-mula mendirikan Cabang Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang kemudian dilebur menjadi Parindra di Samarinda. Namun sebagai wartawan dan Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab "Panggilan Waktoe", sikap politiknya menunjukkan terlalu "kiri" yang tidak sejalan dengan sikap politik PBI/Parindra sebagai Partai Politik Kooperator. Sedang "Panggilan Waktoe" sendiri bukanlah merupakan organ atau pembawa

suara dari PBI/Parindra.

Semula pada tahun 1934 "Panggilan Waktoe" diterbitkan di Kotabaru sebagai surat kabar tengah bulanan. Dalam tahun itu juga bersama pengganggujawabnya hijrah ke Samarinda sebagai surat kabar mingguan.

Dalam tahun 1938 berhubung H. Siregar oleh Landraad Samarinda dijatuhi hukuman penjara yang harus dijalaninya di Jawa (karena persdelict yang kesekian kalinya menimpa "Panggilan Waktoe" yang dipimpinya), maka "Panggilan Waktoe" terpaksa tidak dapat lagi melanjutkan perjuangannya sebagai surat kabar nasional.

Harus diakui bahwa "Panggilan Waktoe" dalam tahun tiga puluhan tidak kecil peranannya dalam kehidupan dan menggelorakan semangat kebangsaan di kalangan rakyat Kalimantan Timur, terutama para pemuda. Dan yang menjadi "jiwa"-nya Panggilan Waktoe ini adalah H. Siregar yang sebagai Wartawan nasional yang revolusioner, berkali-kali ke luar masuk penjara penjajah karena tulisan-tulisannya yang keras menyerang politik penjajahan.

2. Undang-Undang Sekolah Swasta (Wilde Scholen Ordonnantie).

Sekolah-sekolah Taman Siswa di jaman penjajahan tidak ada satu pun yang berdiri di Kalimantan Timur.

Tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada sekolah - Nasional yang berarti di daerah ini. Meskipun sesuai dengan suasana pada waktu itu mempergunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar atau Voertaal.

Yang sudah jelas diketahui, di Samarinda ber - diri Neutrale School dan di Balikpapan berdiri Particulir HIS. Meskipun tidak resmi di bawah PBI/Parindra, namun pengurus dan guru-gurunya terdiri dari orang-orang dari partai ini, baik yang di Samarinda maupun di Balikpapan.

Guru Kepala Particulir HIS di Balikpapan malah seorang tokoh Parindra di kota tersebut yaitu Achmad Nino Hadjarati. Berhubung dengan kenyataan ini, pihak penguasa Hindia Belanda selalu mengadakan pengawasan terhadap sekolah-sekolah swasta tersebut, terutama menyelidiki apakah terhadap murid-muridnya diajarkan juga pengetahuan Politik (menentang penjajahan), suatu mata pelajaran yang dilarang oleh pemerintah.

Dan dengan sendirinya Wilde Scholen Ordonnantie berlaku juga terhadap sekolah-sekolah swasta tersebut, karena ordonnantie tersebut akhirnya dicabut oleh pihak penjajah, karena timbulnya lijde-lijk verzet yang dipelopori oleh Taman Siswa, maka bagi pihak pemerintah jajahan tidak ada alasan un-

tuk "mematikan" sekolah-sekolah swasta (Nasional). Meskipun demikian pemerintah tidak pernah memberikan bantuan untuk kemajuan sekolah swasta tersebut.

Sekolah-sekolah tersebut baik Neutrale School di Samarinda maupun Particulir HIS di Balikpapan semata mata berdiri di atas kaki sendiri, hanya dengan bantuan sumbangan para orang tua murid baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.

Dapat diberitakan pada sekolah-sekolah swasta hampir tidak terdapat anak-anak dari ambtenaar, baik karena takut kedudukannya menjadi goyah, maupun karena ancaman halus dari pihak penjajah.

Sekolah-sekolah tersebut tetap berdiri dan kian berkembang sampai jatuhnya Hindia Belanda dalam Perang Dunia II pada tahun 1942.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Seperti diketahui dalam permulaan abad ke-20 banyak terjadi peristiwa penting di dunia Internasional. Peristiwa-peristiwa penting tersebut antara lain Perang Dunia I yang terjadi tahun 1914 - 1918 dan Depresi Ekonomi (Zaman Malese) yang terjadi kurang lebih tahun 1930 - 1933. Dua kejadian ini tidak dapat dipisahkan meskipun jarak kejadian dua peristiwa tersebut cukup jauh.

Setelah Perang Dunia I berakhir keadaan keuangan

dunia menjadi kacau. Banyak negara yang terpaksa mengedarkan banyak sekali uang kertas. Akibatnya terjadi inflasi dan kekacauan dalam lapangan ekonomi. Sedang di pihak lain, setelah Perang Dunia I berakhir banyak permintaan akan barang industri padahal produksi terbatas sekali. Ini mendorong banyak negara untuk menyelenggarakan industri secara besar-besaran. Kemudian ternyata produksi melampaui batas dan tidak seimbang dengan pembeli.

Gejala umum dalam masa krisis ekonomi ini ialah pengangguran yang merajalela dan turunnya harga. Sebagai contoh penjualan barang-barang ekspor dari Indonesia pada tahun 1913 hanya dapat dibelanjakan sejumlah separo dari barang yang dapat dibeli dengan hasil penjualan barang-barang ekspor yang sama pada tahun 1929.*)

Sebagai daerah jajahan politik perekonomian Indonesia berada di tangan Pemerintah Belanda. Kalimantan Timur seperti juga dengan daerah-daerah jajahan Belanda di Indonesia boleh dikata memiliki ciri-ciri yang sama dalam masa depresi yaitu merajalelanya pengangguran, turunnya harga barang

*) R.A. Djakartirta dan Mr. Santoso Pujosubroto, Sejarah Perekonomian Cetakan IX, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 36.

dan turunnya daya beli rakyat. Banyak perusahaan yang terpaksa memberhentikan pekerja-pekerjanya. Yang sangat terpuakul, adalah pengusaha yang berge - rak di bidang eksploitasi tradisional seperti getah, rotan, damar, kulit besi dan lain-lain. Dalam krisis tersebut produksi bahan mentah jauh lebih mero - sot harganya dibanding dengan barang produksi in - dustri atau barang-barang jadi. Penyusutan tenaga ternyata tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swas - ta tetapi juga oleh pemerintah.

Pemerintah terpaksa membebas-tugaskan pegawai-pe - gawainya untuk sementara waktu dengan diberi uang tunggu (wachtgeld) sebanyak 50% dari gaji yang di - terimanya. Sedangkan perusahaan seperti : BPM, OBM, Res Co, Wang Phing, Trading Co, Borsumy terpaksa me - ngadakan penghematan (bezuiniging) terhadap buruh - buruhnya yang dalam bahasa daerah dikenal dengan na - ma pengerempengan. Bank dan rumah gadai dalam masa krisis ini boleh dikata sudah tidak berfungsi lagi.

Zaman Malese di lidah rakyat diucapkan Zaman Me - leset sebagai ucapan sinis terhadap zaman yang penuh dengan keperihan kehidupan ekonomi tsb. Kota terutama, Samarinda, Balikpapan, dan Tarakan dipadati oleh o - rang-orang yang tanpa kerja karena pengerempengan - pengerempengan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran

kriminil melonjak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Buruh-buruh yang berasal dari Jawa karena pengempangan-pengerempangan ini kembali mengerjakan pekerjaannya semula yaitu bertani dan berkebun. Dibanding dengan bekas buruh lainnya kehidupan mereka masih mendingan, meskipun pada waktu itu hasil penjualan pertanian mereka sungguh tidak memadai benar.

Banyak di antaranya yang hingga kini secara turun-temurun menekuni pekerjaan bercocok tanam ini dan tidak menukarnya dengan mata pencaharian lainnya seperti di Loa Kulu.

Setelah melewati masa yang cukup lama keadaan perekonomian makin lama makin membaik. Ketika keadaan menjadi normal, pemerintah kembali mempekerjakan pegawai-pegawai yang mendapat uang tunggu. Demikian pula perusahaan-perusahaan swasta, kembali mempekerjakan buruh-buruh yang diberhentikananya dulu. Keresahan rakyat berangsur-angsur berkurang dan keadaan pun menjadi normal kembali.

C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN / ORGANISASI

1. P N I Baru

Di Kalimantan Timur tidak ada Cabang dari P N I baru, yang merupakan pecahan dari P N I lama yang didirikan oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawan.

Demikian juga P N I (lama) yang kemudian dilarang oleh Pemerintah jajahan, tidak ada cabangnya di daerah ini.

Namun ini tidak berarti, bahwa tidak ada pererangan di daerah ini yang beraliran radikal dalam pendirian politiknya. Antara lain, orang-orang dari luar daerah yang menjadi anggota (pernah menjadi anggota) dari salah satu partai politik non-kopertor, baik P N I (lama) atau P N I baru yang kemudian menetap di Kalimantan Timur.

Ini antara lain tercermin dari tulisan-tulisan dalam koran daerah, yang mencerminkan pendirian atau sikap politik yang radikal dari penulisnya. Di samping itu banyak juga orang-orang di daerah ini yang berlangganan majalah/koran terbitan Jawa (Jakarta) yang merupakan organisasi resmi maupun setengah resmi dari PNI misalnya "pikiran Rakyat" dan "Daulat Rakyat".

Juga Partindo (Partai Indonesia) yang merupakan "Pecahan" dari P N I (lama) di samping P N I baru, tidak pernah bercabang di Kalimantan Timur.

2. Partai Syarikat Islam Indonesia.

Meskipun dalam tahun dua puluhan, tahun 1917 di Kalimantan Timur telah berdiri cabang-cabang Syarikat Islam (S I) yang mempunyai anggota sampai ribu-

an orang, tetapi pada awal tahun tiga puluhan kegiatan cabang-cabang S I tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagai P S I I tidak ada cabangnya di daerah ini. Hal ini terbukti dalam GAPI, yang juga berdiri di berbagai kota Kalimantan Timur, antara lain di Samarinda dan Balikpapan dengan aksi "Indonesia Berparlemen" dalam tahun 1939, tidak terdapat PSII sebagai anggotanya.

Tetapi tidak sedikit di antara orang S I yang sesudah berdirinya partai-partai politik di daerah ini, menjadi anggota dari salah satu partai politik itu. Dalam Gerindo cabang Samarinda misalnya, yang berdiri dalam tahun 1937 terdapat seorang tokoh S I di Samarinda yakni A Kamaluddin, bahkan menjadi anggota pengurus. Mengingat usianya yang sudah lanjut, sedang anggota lain umumnya masih muda-muda, beradanya A. Kamalluddin dalam lingkungan warga Gerindo Samarinda itu sedikit banyak memperbesar semangat perjuangan anggota yang muda-muda itu. Dan bagi Gerindo cabang Samarinda beradanya A. Kamalluddin itu merupakan suatu kebanggaan, terutama mengingat bahwa dia dulunya adalah salah seorang tokoh S I.

3. P a r i n d r a.

Parindra singkatan dari Partai Indonesia Raya, merupakan peleburan dari Budi Utomo, Persatuan -

Bangsa Indonesia dan beberapa perkumpulan lain yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1935. Dalam tahun 1933 sekelompok pemuda yang berjiwa kebangsaan berusaha mendirikan cabang PBI di Samarinda.

Sebagai pelopornya ialah Horas Siregar, yang baru datang dari Kotabaru Kalimantan Selatan, di samping itu menjadi pemimpin Redaksi/Penanggungjawab mingguan "Panggilan Waktu". H. Siregar sendiri duduk sebagai ketua dari cabang Parindra itu, dengan didampingi oleh Wahel sebagai wakil ketuanya. Penulis I, II dan III ialah Achmad Noor, Aswin Toyo dan M. Djamdjani, sedang Bendahara dan Pembantu (hanya seorang), masing-masingnya M. Amin dan Maskoen Karim. Tetapi karena sangat kerasnya rintangan dari pihak pemerintah jajahan di Samarinda (Kaltim umumnya) pada waktu itu terhadap pergerakan rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air, maka cabang PBI yang didirikan pertama kali itu boleh dikatakan tidak dapat bergerak.

Juga di Balikpapan pada tahun 1933 berdiri cabang PBI dengan Achmad Nino Hadjarati sebagai ketuanya. Namun seperti halnya dengan cabang PBI di Samarinda, cabang Balikpapan ini hanya dapat bergerak secara diam-diam berhubung dengan hebatnya rintangan daripihak penjajah.

Meskipun P B I bukan sebuah partai politik non

koperator, namun waktu itu tidak ada pegawai negeri yang menjadi anggotanya, sebab diancam baik secara terang-terangan maupun secara halus oleh pihak pemerintah untuk diberhentikan bilamana ketahuan menjadi anggota dari partai politik itu.

Tetapi ada juga pegawai jurutulis yang menjadi anggota dan bersedia memilih berhenti menjadi pegawai karena lebih mencintai partainya yang berarti ikhlas berkorban demi kepentingan Bangsa dan Tanah Air. Antara lain Wehel, salah seorang pengurus PBI cabang Samarinda sebelumnya menjadi jurutulis (schrijver) pada Kantor Controleur Van Oost Kutai di Samarinda.

Dalam tahun 1934, Roestam Effendi, salah seorang tokoh PBI di Kotabaru pindah ke Samarinda. Kemudian atas prakarsa pengurus cabang PBI di kota ini direorganisasi dengan dia sendiri (Roestam Effendi) duduk sebagai ketuanya, sedang Achmad Noor yang sebelumnya menjadi penulis I dalam susunan pengurus baru, merangkap menjadi wakil ketua. Wahel yang menjadi wakil ketua dalam susunan pengurus lama pada waktu itu sudah pindah ke Samarinda.

Dalam tahun 1934 itu, M. Rasjad seorang bekas anggota Partindo Surabaya pindah ke Samarinda, dan masuk cabang PBI di kota ini.

Dengan masuknya M. Rasjad maka P B I cabang Samarinda menjadi lebih bersemangat dan anggotanya sedikit demi sedikit bertambah. Pihak Pemerintah jajahan tidak mungkin lagi menghambat perkembangannya, kecuali mengamati setiap tindak tanduk para anggota dan lebih-lebih pengurusnya.

Dalam tahun 1935 PBI dilebur dengan beberapa organisasi/gerakan rakyat lainnya menjadi PARINDRA. Sesudah menjadi Parindra, pengurus cabangnya di Samarinda diperbaharui. Dalam susunan pengurus baru ini tampil seorang yang sudah berusia agak lanjut sebagai wakil ketuanya, yakni H. Arie Rachim. Ketua - nya tetap Roestam Effendi, sedang Achmad Noor yang dalam susunan pengurus lama menjadi wakil ketua merangkap penulis, untuk selanjutnya memegang jabatan penulis saja.

Selain itu dibentuk juga gerakan kepanduan "Sur - ya Wirawan" sebagai onderbouw dari Parindra. Di samping mengadakan kursus pemberantasan buta huruf dan kursus politik di kalangan anggotanya, Parindra di daerah ini melakukan kegiatan sosial/ekonomi lainnya antara lain membuka toko koperasi. Selain itu sejak tahun 1936, Parindra cabang Samarinda membuka Neut - rale School, sebagai saingan dari Gouvernements HIS yang sudah lebih dulu berdiri di kota ini.

Sementara itu sudah terdapat pegawai-pegawai ne-

geri yang terang-terangan menjadi anggota Parindra di Kalimantan Timur. Di Samarinda, misalnya beberapa orang pegawai kantor pos yang berasal dari Jawa antara lain M. Soejono bahkan bergerak dengan aktif sebagai orang partai. Tidak sedikit pula pegawai negeri yang memberikan sumbangan materi secara di belakang layar, karena untuk tampil secara terang-terangan mereka rupanya masih khawatir akan goyah kedudukannya.

Dapat diterangkan di kalangan Parindra Samarinda terdapat seorang tua yang merupakan "tukang belakang" dalam soal keuangan, dia ini adalah H. Soelaeman, seorang pedagang yang dermawan dan jiwa kebangsaannya tebal.

Dalam tahun 1937, M. Hoesni Thamrin anggota ge-delegeerde dari Volksraad dan salah seorang Pengurus Besar Parindra berkunjung ke Kalimantan Timur. Kesempatan ini dipergunakan oleh cabang-cabang Parindra di Balikpapan dan Samarinda untuk mengadakan rapat propaganda.

Akibatnya Parindra daerah ini semakin berkembang dan dari kalangan pegawai negeri semakin banyak yang berani secara terang-terangan memasuki partai ini. Seperti sudah diketahui, Parindra adalah sebuah partai politik yang koperator (bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda).

Sementara itu supir-supir Indonesia di daerah ini, atas prakarsa Parindra dipersatukan dalam sebuah organisasi yang bernama Bond Indonesische Chauffeurs disingkat BIC dan dengan sendirinya BIC ini merupakan onderbouw dari Parindra.

Tahun 1939/1940 merupakan tahun "musibah" bagi Parindra di Kalimantan Timur, khususnya cabangnya di Samarinda. Pada akhir tahun 1939 di Sangkulirang yang sudah mempunyai cabang Parindra, mengadakan rapat umum. Dua orang utusan dari Samarinda, yakni M. Rasjad dan Bustani Hs. tampil sebagai pembicara. Bustani Hs. pada waktu itu masih sangat muda dan dia sebenarnya baru berada pada tingkat Surya Wirawan - (sebagai pengurus Surya Wirawan).

Didorong oleh semangat mudanya yang menggelora (dalam menyerang penjajah) pidatonya dalam rapat umum di Sangkulirang itu menyebabkan Bustani Hs. terkena Spreekdelict dituduh melanggar artikel 153 bis dan ter, yang terkenal sebagai "artikel karet" yang menjerat banyak kaum pergerakan.

Dalam bulan Januari 1940, Bustani Hs. yang sudah berada kembali di Samarinda, ditangkap oleh pihak penjajah untuk selanjutnya dihadapkan ke depan pengadilan (Landraad). Dalam sidangnya tanggal 14 Mei 1940, Landraad Samarinda menjatuhkan hukuman pen

jara 2 tahun terhadap Bustani Hs. yang harus dijalaninya di luar daerah, yakni di Nusakambangan (Cilacap)

Tanggal 5 Januari 1942, sesudah pecahnya Perang Pasifik dan hanya beberapa bulan menjelang jatuhnya Hindia Belanda di bawah kekuasaan Jepang, Bustani Hs. dibebaskan dari hukuman penjaranya.

Bustani Hs. adalah putera daerah pertama yang sebagai orang pergerakan (politik) dihukum karena spreek delict.

Sementara itu dalam tahun 1940, seorang anggota Parindra di Sangkulirang bernama A. Rasjid bekerja sebagai jururawat (verpleger) pada rumah sakit Jepang, karena dianggap membahayakan bagi kekuasaan penjajahan ia diusir dari Sangkulirang. Sesudah kemerdekaan A. Rasjid menjadi Bupati Kota Baru dan kemudian dipindahkan ke Samarinda sebagai Bupati d/p Gubernur Kaltim; kini dia sudah pensiun, dan tetap berdomisili di Samarinda.

4. G e r i n d o

Akhir tahun 1937, di Kalimantan Timur berdiri cabang dari sebuah partai politik yang baru beberapa bulan sebelumnya didirikan di Jakarta.

Partai politik ini ialah Gerindo (singkatan dari Gerakan Rakyat Indonesia) dalam pengurus besarnya duduk antara lain : Dr. A.K. Gani, Mr. Amir Sya-

rifuddin dan Adam Malik (yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia)

Pembentukan Gerindo Cabang Samarinda diprakarsai antara lain oleh Aswin Toyo, Ishak Sani, Oemar Dahlan dan M. Djunaedi. Perlu diterangkan Aswian Toyo yang turut jadi pendiri cabang Gerindo Samarinda ini, ialah yang beberapa tahun sebelumnya merupakan seorang pendiri cabang FBI Samarinda, dan dalam susunan pengurusnya duduk sebagai penulis kedua.

Tetapi jiwanya yang revolusioner, rupanya tidak dapat disalurkan dalam FBI (kemudian Parindra) sebagai partai politik, yang koperator, sehingga dengan berdirinya Gerindo (sesudah dilarangnya Partindo oleh pemerintah jajahan) yang meskipun tidak secara a priori menjalankan politik non-koperasi, dia melihat bahwa dalam partai yang baru ini aspirasi politiknya dapat tersalurkan. Inilah sebabnya dia langsung "meloncat" ke Gerindo, dengan turut memprakarsai pembentukan cabangnya di Samarinda dan sekaligus turut duduk dalam susunan pengurusnya. Lain halnya dengan Parindra, yang anggotanya terdapat juga pegawai-pegawai negeri, maka pada cabang-cabang Gerindo boleh dikatakan tidak terdapat seorang pun pegawai negeri menjadi anggota Gerindo, pegawai negeri (yang berjiwa kebangsaan) lebih be-

sar resikonya daripada kalau dia menjadi anggota Pa-rindra.

Dalam tahun 1938 Dr. A.K. Gani yang pada waktu itu menjadi Ketua Pengurus Besar Gerindo mengunjungi cabang-cabangnya di Kalimantan Timur (Balikpapan dan Samarinda), kesempatan tersebut dipergunakan untuk mengadakan rapat umum oleh cabang-cabang tersebut. Dalam tahun 1939, Adam Malik seorang anggota pengurus besar lainnya dari Gerindo berkunjung juga ke daerah ini.

Mengingat bahwa pada waktu itu di Eropa sedang memuncak krisis yang dapat menimbulkan pecahnya perang dunia (dan yang memang ternyata pecah juga dengan terjadinya serangan Jerman terhadap Polandia pada 1 September 1939), maka pengawasan dari pihak alat-alat kekuasaan penjajah terhadap kedatangan Adam Malik di Kalimantan Timur itu, dirasakan sangat ketat. Ke mana dia pergi selalu dibuntuti oleh petugas-petugas intelijen, dan tempat penginapannya baik selama di Balikpapan maupun di Samarinda tidak pernah lepas dari intipan para "Cecunguk" (sebutan yang mengandung ejekan dari orang-orang pergerakan di Kalimantan Timur terhadap mata-mata penjajah yang terdiri dari orang-orang Indonesia sendiri).

Meskipun demikian, didorong oleh semangat yang

meluap dari para pengikutnya baik di Balikpapan maupun di Samarinda Gerindo dapat juga mengadakan rapat umum sehubungan dengan kedatangan anggota pengurus besarnya (Adam Malik) dari Jakarta, dengan mendapat kunjungan masyarakat yang cukup besar (menurut ukuran pada waktu itu).

5. Penyadar.

Dengan tumbuhnya cabang-cabang Penyadar di Kalimantan Timur pada tahun 1939, gerakan politik daerah ini bertambah ramai. Penyadar adalah pecahan dari PSII karena perbedaan strategi perjuangan di kalangan para pemimpinnya. Salah seorang tokoh PSII yang memisahkan diri dan membentuk Penyadar, ialah A.M. Sangadji, seorang tokoh tua yang sudah kenyang dengan pahit manisnya pergerakan kemerdekaan, seangkatan dengan H.A. Salim dan H.O.S. Tjokroaminoto.

A.M. Sangaji inilah yang membentuk cabang-cabang Penyadar di Kalimantan Timur, dan selanjutnya menetap di Samarinda sampai sesudah Hindia Belanda jatuh di tangan Jepang. Bagi angkatan tua di daerah ini, terutama Samarinda dan Tenggarong, A.M. Sangadji bukan merupakan "orang asing lagi, sebab dalam tahun 1917 sampai awal tahun dua puluhan beliau pernah tinggal di Tenggarong.

Dalam tahun-tahun tersebut SI Kalimantan Timur mengalami masa jayanya, sehingga konon mempunyai anggota sampai ribuan orang.

Berhubung dengan ini, waktu A.M. Sangadji berada kembali di daerah ini dalam tahun 1939 dan membentuk cabang-cabang Penyadar tidak sedikit dari orang-orang SI dulu yang menjadi anggotanya. Bahkan ada orang SI yang sudah memasuki Parindra, pindah ke Penyadar antara lain : E.M. Rasjidi seorang pokrol yang terkenal di daerah ini.

Berlainan dengan Parindra dan Gerindo yang para anggotanya terdiri orang muda, anggota Penyadar terdiri dari orang-orang yang sudah berusia lanjut.

Namun terlepas dari sebagai tokoh Penyadar, A.M. Sangadji mendapat banyak pengikut di kalangan pemuda, khususnya untuk menerima gemblengan beliau dalam perjuangan menuntut kemerdekaan.

Berhasilnya beliau dalam menarik banyak pemuda sebagai "muridnya" itu, antara lain disebabkan oleh keahliannya dalam berpidato yang menggugah semangat para pendengarnya.

6. G A P I

GAPI singkatan dari Gabungan Politik Indonesia dibentuk dalam tahun 1939 berpusat di Jakarta juga

mempunyai cabang-cabang di Kalimantan Timur, yaitu di Samarinda dan Balikpapan.

Titik berat dari perjuangan GAPI ialah menuntut Indonesia Berparlemen, yang dilancarkan dengan mengadakan rapat-rapat umum (sebutannya pada waktu itu : Openbare Vergadering) pada pokoknya isi dari pada pembicaraan-pembicaraannya terutama tentang pentingnya Indonesia mempunyai parlemen dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari wakil wakil partai politik. Jadi bukan seperti Volksraad, yang anggotanya sebagian besar diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan fungsinya lebih banyak sebagai "badan penasehat" (advieseerend lichaam) saja bagi pemerintah, Parlemen Indonesia yang diperjuangkan pembentukannya oleh GAPI itu mempunyai hak menentukan nasib sendiri.

Dapat diterangkan untuk mencegah kesimpang siuran teks pidato yang akan diucapkan dalam rapat-rapat umum GAPI di daerah-daerah hanya dibacakan saja teks pidato yang sudah digariskan dari pusat.

Karena di Kalimantan Timur pada waktu itu, hanya Parindra dan Gerindo yang merupakan partai-partai politik (Penyadar belum lagi bercabang), maka GAPI di daerah ini didukung oleh dua partai politik itu saja. Namun dukungan moril dan material diberi-

kan oleh organisasi-organisasi rakyat lainnya yang tidak berjuang di bidang politik termasuk organisasi-organisasi agama, antara lain Muhammadiyah. Rapat-rapat umum GAPI di Kalimantan Timur, berlangsung pada awal tahun 1940, di Samarinda para pembicaranya antara lain : M. Rasjad dari Parindra, Ishak Sani dan Oemar Dahlan dari Gerindo sedang pimpinan rapat dipegang oleh M. Soejono dari Parindra.

Dengan terjadinya perang di Eropa pada waktu itu (sejak 1 September 1939), maka penjagaan terhadap rapat umum GAPI sangat ketat, walaupun begitu rapat umum berjalan lancar sampai selesai dan mendapat kunjungan besar dari berbagai lapisan rakyat.

7. M I A I.

Di Kalimantan Timur juga dibentuk MIAI, merupakan singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI adalah suatu gabungan dari berbagai organisasi Islam di Indonesia, didirikan di Surabaya pada tanggal 21 September 1937. Dengan tujuan untuk mendiskusikan dan memutuskan berbagai masalah penting yang berhubungan dengan masyarakat dan agama Islam MIAI Kalimantan Timur didukung tidak saja oleh organisasi agama tetapi juga oleh partai politik,

yang mendukung wakilnya dalam pengurus MIAI. Sebagai ketuanya M. Soejono sedangkan penulisnya Oemar Dahlan.

Kegiatan MIAI Kalimantan Timur antara lain membantu Mukmin Indonesia yang terlantar di Tanah Suci Mekkah dengan mengumpulkan sumbangan berupa uang dari para Dermawan, kemudian dikirimkan kepada MIAI Pusat. Diperoleh keterangan MIAI di Samarinda sempat dua kali mengirim uang melalui MIAI pusat untuk membantu meringankan penderitaan kaum Mukmin Indonesia itu, sebesar 500 gulden setiap kali mengirimkan. Dengan terjadinya Perang Pasifik beberapa bulan kemudian Hindia Belanda runtuh dan Indonesia diduduki oleh Jepang, sehingga kegiatan MIAI dengan sendirinya menjadi terhenti.

8. Petisi Soetardjo

Petisi Soetardjo yang dicetuskan atas prakarsa anggota Volksraad Soetardjo dapat dikatakan mendapat sambutan yang agak dingin di Kalimantan Timur.

Ini terutama disebabkan karena yang dituntut dalam Petisi Soetardjo itu ialah sekedar "Indonesia berpemerintahan sendiri dalam lingkungan Kerajaan Belanda", sedangkan partai-partai politik menuntut kemerdekaan Indonesia lepas dari ikatan dengan Belanda, meskipun ada di antara partai-partai politik

itu yang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersedia bekerja sama dengan pihak penjajah (Belanda) antara lain dengan duduk dalam dewan-dewan yang dibentuknya seperti Parindra.

D. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG.

1. Sikap Pemerintah Hindia Belanda

Meletusnya perang Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya Perang Dunia ke II sampai di Asia Timur, Turut terseretnya Hindia Belanda dalam kancah peperangan melawan Jepang, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda bersikap lebih keras terutama terhadap gerakan politik. Semua kegiatan politik dilarang, bahkan anggota-anggota partai politik tidak diperbolehkan berkumpul lebih dari lima orang.

Berhubung dengan ini, partai-partai politik di Kalimantan Timur, bahkan juga organisasi-organisasi non-politik, tetapi yang berazaskan kebangsaan, seolah-olah menjadi beku karena tidak dapat bergerak.

Sementara itu sehari sesudah terjadinya Perang Pasifik, pemerintah jajahan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggapnya pro

Jepang. Tidak saja orang-orang Cina (yang pada waktu itu disebut : Tionghoa), baik totok maupun peranakan, tetapi juga terhadap orang-orang Indonesia. Penangkapan terhadap orang-orang Indonesia terutama terjadi di Sangkulirang, di situ terdapat konsesi Jepang dengan membuka perusahaan perikanan Nanyo Rinyo Kabushiki Kaisha (NRKK). Puluhan orang Indonesia yang bekerja pada NRKK ini ditangkap dan kemudian diinternir ke Jawa.

Orang-orang Jepang yang masih berada di Kalimantan Timur baik yang membuka toko (toko sepeda) maupun sebagai tukang foto dengan sendirinya termasuk orang-orang pertama yang ditangkap dan diinternir. Terhadap tokoh-tokoh pergerakan, terutama yang beraliran radikal, seperti Gerindo, diadakan penggeledahan rumah-rumahnya, untuk mencari dokumen yang memberi petunjuk bahwa orang yang bersangkutan ada hubungannya dengan Jepang. Ada yang hanya sampai kepada penggeledahan dengan menyita berbagai surat penting yang tersimpan di rumahnya, tetapi ada juga yang disusul dengan penahanan orang yang bersangkutan. Tetapi sesudah beberapa hari di bebaskan kembali, karena dari surat-surat atau dokumen-dokumen yang disita, tidak ada yang dapat dijadikan petunjuk bahwa orang pergerakan yang bersangkutan

kutan mempunyai hubungan dengan Jepang atau pro Jepang.

Sikap pemerintah Hindia Belanda dalam "membasmi" anasir yang dianggap pro Jepang, mengakibatkan sebuah surat kabar Tionghoa Melayu di Samarinda "Pewarta Borneo" terpaksa menghentikan penerbitannya. Sebab pemimpin Redaksi/Penanggung jawabnya Lim Ek Thoen, seorang Cina peranakan ditangkap, kemudian diinternir.

Penangkapan Lim Ek Thoean ini, di luar dugaan masyarakat. Sebab dalam surat kabar "Pewarta Borneo" yang dipimpinnya, tidak pernah terdapat tulisan atau berita yang menunjukkan pro Jepang atau mengagungkan Jepang. Bahkan sebaliknya, dalam berita-beritanya mengenai Perang Jepang - Cina yang sudah berkecamuk sejak beberapa tahun sebelumnya, "Pewarta Borneo" seringkali menunjukkan sikap yang anti Jepang. Ini terbukti setiap jatuh korban di pihak Jepang, selalu dimuat sebagai berita utama dengan kepala (kop) yang dicetak dengan huruf-huruf besar.

Namun kenyataannya Lim Ek Thoean oleh pihak pemerintah Hindia Belanda dicap sebagai pro Jepang, sehingga sehari sesudah pecahnya Perang Pasifik tanggal 8 Desember 1941 itu, dia ditangkap (untuk kemudian diinternir ke Jawa), akibatnya surat kabar "Pewarta Borneo" tidak terbit, karena tidak ada o-

rang (wartawan) lain yang memimpinya lagi.

2. Keadaan Masyarakat (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Agama).

Keadaan masyarakat boleh dikatakan menjadi beku disegala bidang, sebab pemerintah Hindia Belanda semakin keras mengadakan tindakan atau penjagaan terhadap setiap apa yang timbul di kalangan rakyat, yang dianggapnya dapat membahayakan kedudukannya.

Pendidikan jalan terus, tetapi dengan fasilitas yang terbatas. Perkembangan budaya hampir tidak sempat terpikirkan lagi. Sebab yang menjadi pusat pemikiran ialah bagaimana caranya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup di hari esok.

Hanya di bidang agama, perkembangannya berjalan terus meskipun tidak dapat sepesat seperti pada jaman sebelum terjadinya peperangan. Terutama organisasi-organisasi agama (dalam hal ini Islam) masih dapat sekali-sekali mengadakan tablig, meskipun dengan pengawasan ketat dari pihak penjajah, dan dalam tablig-tablig itu mereka di larang menyinggung soal politik. Sebaliknya Ummat Islam sendiri (juga di kalangan umat-umat beragama lainnya) dengan peperangan yang melanda Hindia Belanda itu, semakin khusus mendekatkan diri kepada Tuhan, memohonkan se-

moga mereka dihindarkan dari malapetaka yang ditimbulkan oleh peperangan.

Berhubung dengan ini surau-surau dan mesjid - mesjid maupun gereja-gereja serta tempat-tempat ibadah untuk agama-agama lainnya, pada umumnya boleh dikatakan selalu penuh sesak dengan orang-orang yang bersujud ke hadirat Tuhan, pada setiap waktu sembahyang.

3. Sikap Masyarakat terhadap Pemerintah Hindia Belanda.

Karena semakin sempitnya hak rakyat dalam ber-sidang dan berkumpul, ditambah dengan sulitnya penghidupan, masyarakat Kalimantan Timur semakin tidak senang terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dalam Perang Pasifik yang melibatkan Hindia Belanda langsung ke dalam kancah peperangan itu, banyak rakyat yang dalam hati kecilnya mengharapkan kekalahan Belanda dan direbutnya Hindia Belanda oleh Jepang.

Lebih-lebih melihat kian majunya Jepang, dan satu demi satu daerah-daerah yang berbatasan dengan Indonesia diduduki oleh tentaranya.

Meskipun hanya dipendam dalam hati, banyak rakyat yang pro Jepang, lebih-lebih mereka yang terpengaruh oleh propaganda Jepang melalui Radio To-

kryo yang mengatakan bahwa tujuan peperangan, dan maksud kedatangannya ke Indonesia adalah untuk membahaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Dan bahwa Jepang adalah "saudara tua" bangsa Indonesia, serta akan membentuk "kemakmuran bersama" di lingkungan Asia Timur Raya".

Memang ada juga rakyat yang membantu pemerintah Hindia Belanda dalam peperangan melawan Jepang itu, tetapi hanya sebagian kecil dan umumnya terdiri dari para pegawai, di antaranya dengan menjadi anggota pasukan Landswacht atau Stadswacht (Penjagaan Kota). Dengan demikian dapat dikatakan mereka membantu Belanda ini pun pada umumnya karena terpaksa saja, sebagai pegawai mereka tidak dapat menolak dilatih menjadi Landswach itu

Di kalangan partai-partai politik orang-orang pergerakan meskipun tidak memberikan bantuannya baik moril apalagi materil, terhadap pihak Pemerintah Hindia Belanda, namun tidak berarti bahwa mereka bersikap pro Jepang, orang-orang pergerakan pada umumnya mengambil sikap "reserve".

4. Keadaan Pemerintah Hindia Belanda di daerah pada saat terakhir.

a. Sesudah Perang Dunia II pecah di Eropa Kali -

mantan Timur yang di jaman penjajahan Belanda disebut Oost Borneo, merupakan bagian (afdeling) dari Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur (Residentie Zuid en Oost Borneo). Pusat pemerintahan Karesidenan ini, dan tempat kedudukan Residen (Belanda) ialah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Sebagai wakil (asisten) di Kalimantan Timur ditempatkan dua orang Asisten Residen, masing-masing berkedudukan di Samarinda dan Tarakan. Yang di Samarinda wilayah kekuasaannya meliputi Kerajaan Kutai dan Pasir, di samping Rechtstreeks Gouvernementsbestuursgebied Samarinda yang terkenal juga dengan sebutan "Vierkanterpaalgebied". Sedangkan wilayah kekuasaan Asisten Residen yang berkedudukan di Tarakan, meliputi Kerajaan Bulongan dan Tidung (yang disebut : Bulongan on Tidung-landen) dan Kerajaan-kerajaan Sambaliung dan Gunung Tabur. Dua Kerajaan yang disebut belakangan ini, hanya merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang bertetangga langsung, dan digabungkan dalam satu daerah yang dinamai "Berau".

Perlu diterangkan, kota Balikpapan pada waktu itu (sampai runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda dalam Perang Dunia ke-II) masuk dalam daerah Kerajaan Kutai, dan sejak zaman penjajahan dulu sudah merupakan kota terbesar dan teramai di Kalimantan -

Timur. Sebab industri minyak bumi dan lilin, yang diusahakan oleh perusahaan Belanda Bataafsche Petroleum Maatschappij (B P M). Sehingga Balikpapan sejak dulu sudah dikenal sebagai "Kota Minyak" dan "Kota Buruh".

Keadaan pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan Timur sesudah Perang Dunia II pecah di Eropa dalam bulan September 1939, belum menampakan kegoyahan. Industri-industri minyak dan batu bara (Oost Borneo Maatschappij di Loa Kulu, di hilir Tenggara - rong dan Steenkolen Maatschappij "Prapatan" di Teluk Bayur, di hulu Tanjung Rereb, Berau) tetap berjalan seperti biasa.

Tetapi terhadap gerakan rakyat, lebih-lebih gerakan politik, pemerintah Hindia Belanda bertindak keras. Pengawasan terhadap kegiatan partai politik diperketat, meskipun rapat umum masih diperbolehkan, namun harus mentaati syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak penguasa setempat.

b. Sesudah Negeri Belanda diduduki Nazi Jerman.

Dengan didudukinya Negeri Belanda oleh tentara Nazi Jerman sejak tanggal 10 Mei 1940, sudah terlibat mulai goyahnya kedudukan Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan Timur. Roda perindustriannya

tidak lagi berputar selancar seperti sebelumnya.

Pengawasan dan tindakan terhadap partai-partai politik dan pergerakan rakyat pada umumnya, semakin diperketat dan diperkeras. Bahkan di kota-kota yang ada cabang partai politik, seperti Samarinda dan Balikpapan, pihak penguasa setempat mengerahkan hampir seluruh aparaturnya untuk melakukan penggeledahan serempak di rumah-rumah tokoh-tokoh partai politik, maupun orang-orang Indonesia lainnya yang dianggapnya "anti Belanda". Rupanya nama dari orang-orang yang bersangkutan sudah lebih dulu dicatat dalam "buku merahnya".

Di antaranya pada waktu itu ada yang ditahan, tetapi beberapa hari kemudian dibebaskan, karena tidak ada bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menahannya terus dan menuntutnya di depan pengadilan.

Rapat-rapat umum partai politik tidak diperkenankan lagi, berhubung dengan diberlakukannya Staat van Oorlog. Pergerakan rakyat dengan demikian praktis menjadi terhenti di Kalimantan Timur.

c. Sesudah Perang Pasifik Pecah

Pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan Timur menjadi tambah goyah. Urusan pemerintahan sipil

hampir tidak diperhatikan lagi. Sebab hampir seluruh perhatian dicurahkan kepada usaha untuk memperkuat pertahanan dari serangan Jepang. Penjagaan daerah dan kota (Landswach dan Stadswacht) diben - tuk di kota-kota besar. Tetapi hanya orang-orang Indonesia yang dianggap setia terhadap Belanda yang boleh menjadi Pasukan Penjaga Kota.

Di samping itu sesudah mengetahui tentara Jepang bertambah maju dan mendekati daerah Indonesia, keluarga-keluarga Belanda diungsikan ke Jawa. Perusahaan-perusahaan dagang Belanda pada umumnya setengah tutup, sebab sebagian besar dari para pegawainya (orang-orang Belanda) dikerahkan sebagai milisi.

Dapat diterangkan, tentara Jepang memasuki/menduduki Kalimantan Timur dari arah utara, sehingga kota Tarakan termasuk yang pertama didudukinya, kemudian kota Balikpapan. Sedang Samarinda yang menjadi tempat kedudukan Assistent Residen Van Kutai en Pasir dimasuki tentara Jepang pada tanggal 3 Februari 1942. Dengan didudukinya Samarinda ini, praktis seluruh kota-kota dan tempat-tempat penting di Kalimantan Timur sudah jatuh di tangan Jepang.

E. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG.

1. Propaganda Jepang yang terasa di Indonesia.

Serangan tiba-tiba angkatan udara Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya Perang Dunia II sampai ke Asia Timur (Pasifik) sehingga Belanda yang berada di pihak negara-negara Sekutu ikut terlibat.

Dengan demikian seluruh Hindia Belanda dinyatakan berada dalam keadaan perang (Staat Van Oorlog). Akibatnya pergerakan rakyat yang sebelumnya sudah dibatasi kegiatannya dilarang sama sekali mengadakan kegiatan lebih-lebih kegiatan politik.

Sejak hari-hari pertama pecahnya Perang Pasifik itu, propaganda Jepang sudah dilancarkan secara intensip terhadap rakyat Indonesia. Tujuan dari propaganda Jepang adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa "perang sucinya" itu adalah untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Selanjutnya membentuk "Kemakmuran bersama di Asia Timur Raya" dengan Dai Nippon sebagai "Saudara Tua" menjadi pelindung dan pemimpin. Meskipun ada larangan keras dari pihak penguasa Hindia Belanda untuk mendengarkan propaganda dari Radio Tokyo (Jepang) yang disiarkan dalam bahasa Indonesia setiap hari, namun tidak kurang penduduk (yang memiliki pesawat radio) secara

diamendiam mendengarkannya.

Dapat dikatakan sebagian besar rakyat Indonesia di Kalimantan Timur terpengaruh oleh propaganda Jepang itu. Bahkan di antara penyiar terdapat bangsa Indonesia yang berbicara (tepatnya membacakan teks propaganda Jepang) di depan pemancar Radio Tokyo itu. Di antaranya seorang mahasiswa dari Kalimantan Timur (Samarinda) yang sudah belajar di sebuah perguruan tinggi di Tokyo.

Usaha dari pihak pemerintah Hindia Belanda untuk melumpuhkan propaganda Jepang tersebut boleh dikatakan tidak berhasil. Bahkan banyak rakyat yang di hati kecilnya mengharapkan kedatangan tentara Jepang ke Indonesia untuk membebaskannya dari penjajahan Belanda. Terutama di kalangan orang pergerakan, yang sebelumnya memang turut berjuang untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia.

Sampai beberapa bulan sesudah pendudukan tentara Jepang di Kalimantan Timur, tidak ada seorang pun yang mempunyai prasangka bahwa bila Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya itu, Jepang selanjutnya akan menggantikan kedudukan Belanda sebagai penjajah baru.

Meskipun demikian sampai masuknya tentara Jepang, tidak terdengar tentang adanya gerakan sabotase.

tase oleh pihak rakyat di Kalimantan Timur terhadap bangunan-bangunan maupun alat-alat perlengkapan atau keperluan perang Belanda yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh.

2. Waktu kedatangan pasukan Jepang

Kalimantan Timur termasuk daerah-daerah yang pertama dari kepulauan Indonesia, yang diduduki oleh tentara Jepang. Angkatan Laut yang datang di Kalimantan Timur dari arah utara melalui kepulauan Philipina yang sudah lebih dulu didudukinya.

Kota pertama yang diduduki Jepang di Kalimantan Timur ialah kota minyak Tarakan, yang terletak paling utara. Sesudah itu Balikpapan juga kota minyak dan juga merupakan kota terbesar di Kalimantan Timur.

Samarinda sebagai kedudukan pemerintah sipil Belanda tertinggi (Asisten Residen) diduduki tentara Kaigun Jepang pada tanggal 3 Februari 1942. Tentara Jepang masuk kota Samarinda dengan menembus jalan darat dari beberapa jurusan dari Balikpapan. Sebelumnya Jepang telah menduduki Sanga-Sanga, kota minyak kecil yang terletak di pinggir anak sungai Mahakam kira-kira 10 mil di hilir Samarinda.

II. Pada umumnya rakyat Indonesia di Kalimantan Timur menyambut kedatangan tentara Jepang dengan penuh kegembiraan. Mereka menyambutnya sebagai "tentara pembebasan" yang akan "memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda" sebagaimana yang dipropagandakan Jepang melalui Radio Tokyo.

Bahkan nampak jelas di Samarinda, pada waktu Jepang masuk, banyak rakyat menyodorkan makanan dan minuman dalam botol kepada tentara Jepang, sedangkan teriakan Banzai (hidup) seringkali terdengar setiap berpapasan dengan serdadu Jepang.

Pakaian tentara Kaigun Jepang yang umumnya lusuh-lusuh serta pet (tutup kepala) dan sepatunya yang jauh daripada bagus (bahkan banyak yang kelihatannya longgar) lain sekali keadaannya dengan pakaian tentara Belanda/KNIL yang boleh dikatakan serba lux, menimbulkan rasa simpati dan kekaguman rakyat Kalimantan Timur.

Lagi pula pada awal pendudukannya serdadu-serdadu Jepang memperlihatkan sikap yang cukup manis kepada penduduk, lebih-lebih terhadap anak-anak kecil. Sehingga hampir setiap serdadu atau beberapa orang serdadu Jepang yang berjalan berkelompok selalu ramai diiringi oleh anak-anak dan Sang Heitaisan sendiri nampaknya senang diiringi anak-anak itu.

3. Sikap Jepang terhadap aparatur Pemerintah Hindia Belanda.

Lain dengan harapan dan pikiran rakyat, terutama kaum pergerakan, Jepang ternyata tetap menggunakan aparatur pemerintah Belanda yang terdiri dari bangsa Indonesia. Bahkan di Samarinda dua orang polisi Indo-Belanda yang memegang pimpinan (Seorang Inspektur dan seorang Hoofdagent) tetap dipekerjakan menurut jabatannya semula, meskipun atasannya seorang pembesar polisi Jepang.

Tetapi tidak lama kemudian, kedua orang Indo-Belanda bekas polisi Hindia Belanda itu, dibawa ke Balikpapan, tempat kedudukan pemerintah militer Jepang tertinggi untuk Kalimantan Timur, dan kabar-kabar yang tersiar belakangan mengatakan bahwa keduanya menjadi korban keganasan Jepang.

Satu-satunya pegawai bangsa Indonesia di Samarinda yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang ialah Iskandar yang pada zaman Hindia Belanda memegang jabatan Komisaris pada Kantor Asisten Residen. Tindakan tersebut dinilai masyarakat sebagai suatu keberanian, lebih-lebih karena mengingat kedudukannya yang tinggi sebagai Pegawai Pemerintah Hindia - Belanda. Sebab bagi pemerintah pendudukan Jepang dalam masa perang itu hanya ada dua pihak kawan atau lawan.

Yang bersedia kerjasama dengan Jepang, dianggap gapnya kawan, sebaliknya yang menolak dianggap sebagai musuh. Kemudian Kemis Iskandar (demikian namanya masih disebut oleh penduduk yang mengenalnya) diambil dari rumahnya pada suatu malam, dan tidak pernah kembali lagi. Dia bersama puluhan orang lainnya diambil dari rumah masing-masing dalam waktu yang hampir bersamaan dan ternyata mereka dipenggal kepalanya oleh Jepang.

Sementara itu tiga orang pembesar Belanda, Asisten Residen, Controleur van Oost Kutai dan Aspirant Controleur Sangkulirang dan seorang Belanda lainnya bukan ambtenaar juga menjadi korban keganasan tentara Jepang, hanya beberapa hari sesudah Samarinda berhasil mereka duduki. Padahal ke empat orang Belanda itu tidak menyembunyikan diri sewaktu Jepang masuk, malah mereka melaporkan diri dengan membawa bendera putih tanda menyerah kepada Jepang. Seorang pembesar lainnya di Tenggarong yang tetap tinggal di tempat sewaktu Jepang masuk, dikabarkan mengalami nasib yang serupa.

4. Sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia.

Seperti telah diterangkan di muka, dalam bulan bulan pertama, perlakuan pemerintah pendudukan Je-

pang terhadap bangsa Indonesia, pada umumnya dapat dikatakan baik. Di Samarinda rakyat diizinkan mengibarkan Bendera Merah Putih di sampaing Bendera Hinomaru. Mereka juga diperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetapi menjelang tahun 1943, pengibaran bendera Merah Putih dan mendengarkan lagu Indonesia Raya itu dilarang. Di samping itu perlakuan tentara Jepang terhadap penduduk berbalik menjadi keras, hal tersebut terjadi karena semakin terdesaknya Jepang dalam peperangan sehingga satu demi satu daerah yang pernah direbut dan didudukinya, direbut kembali oleh tentara Sekutu.

Bahkan pada waktu Jepang masih jaya-jayanya, hampir 20 orang tokoh pergerakan di Samarinda termasuk A.M. Sangadji (seorang tokoh pergerakan ka-liber Nasional seangkatan dengan Tjokroaminoto dan H.A. Salim) ditangkap dan ditahan oleh tentara pendudukan Jepang.

Padahal baru kira-kira sebulan sebelumnya A. M. Sangadji dan kawan-kawannya menyelenggarakan rapat raksasa di sebuah lapangan sepak bola di Samarinda untuk menyambut kemenangan Jepang, dan menyatakan kesediaannya bekerjasama dengan Jepang. Pembicaraan utamanya A.M. Sangadji.

Di Sekitar lapangan tersebut berpancangan bendera Jepang dan bendera Merah Putih yang berselang-seling melambangkan kerjasama dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo), dengan semangat yang menggelora.

Dalam pidatonya dikemukakan oleh A.M. Sangadji terima kasih bangsa Indonesia terhadap Dai Nippon yang telah berhasil membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, dan selanjutnya akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.

Terselenggaranya rapat raksasa yang bersejarah dalam bulan Mei 1942 itu dengan seizin dan dengan bantuan pihak pemerintah militer setempat. Namun kurang lebih sebulan kemudian terjadilah peristiwa yang menggemparkan itu, yakni penangkapan besar-besaran oleh pihak Jepang terhadap hampir 20 orang tokoh utamanya). Hampir seluruh orang yang ditahan itu terdiri dari anggota-anggota partai politik, yakni Gerindo, Parindra dan Penyedar. Penahanan tersebut berlangsung sekitar dua minggu, kemudian semua dibebaskan, sesudah diadakan semacam interogasi terhadap beberapa orang yang dianggap sebagai "biang keladi."

Sesudah peristiwa tersebut, mulailah timbul ke-

ragu-raguan di kalangan rakyat, terutama kaum pergerakan, bahwa tujuan dari peperangan Jepang itu, bukan untuk memerdekakan Indonesia.

5. Sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang

Sebagaimana telah diterangkan di muka, pada saat tentara Jepang memasuki Kalimantan Timur sampai beberapa bulan sesudahnya, sikap bangsa Indonesia di daerah ini pada umumnya baik dan bersahabat terhadap tentara pendudukan Jepang itu.

Apalagi karena tentara Jepang mula-mula memperlihatkan sikap bersahabat terhadap orang-orang Indonesia, yang memberikan kesan bahwa kedatangan mereka ke Indonesia memang benar-benar untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Sehingga ucapan "Dai Nippon - Indonesia sama-sama" sering terdengar pada waktu itu. Tetapi sesudah itu, mulai terlihat sikap yang keras dari pihak tentara Jepang terhadap penduduk. Terutama dari tentara militernya yang di sebut Kei Bitai selalu main pukul dan tendang terhadap rakyat, meskipun hanya karena kesalahan kecil.

Rakyat yang lupa memberi hormat dengan menghadap sambil membungkukkan kepala kepada Kei Bitai di panggil kedekatnya dan setelah dekat dihadiahkan dengan

tempelengan bertubi-tubi. Bahkan tidak jarang terjadi orang yang malang itu disuruh berdiri tegak selama setengah sampai satu jam di pos penjagaan Jepang, sebelum dia diperkenankan melanjutkan perjalanannya.

Kalau bersepeda melintasi pos penjagaan, harus turun untuk memberikan penghematan terhadap sang Kei Bitai yang sedang jaga. Perubahan sikap dari lunak menjadi agak keras dan kemudian keras ini dengan sendirinya menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap Jepang secara berangsur-angsur menjadi berkurang, dan akhirnya lenyap sama sekali. Rakyat mulai ragu-ragu bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda, Bahkan sudah mulai timbul anggapan di kalangan rakyat, bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia untuk menggantikan Belanda sebagai penjajah.

Dari hari ke hari, sikap tentara pendudukan Jepang terhadap rakyat bertambah keras. Tindakan dari Kei Bitai bertambah kejam, bahkan tidak jarang terjadi penduduk yang dihukum itu tidak bersalah apa-apa. Sehingga rakyat hidup dalam ketakutan dan perasaan tidak aman selalu menyelimuti batinnya, mereka dihantui penangkapan Kei Bitai tanpa mengetahui kesalahannya.

Dalam tahun 1944 di Kalimantan Timur Jepang juga membutuhkan pemuda-pemuda Indonesia untuk di - latih menjadi Heiho, yang dikatakannya sebagai "Pra- jurit Pembebasan Tanah Air". Untuk keperluan ini Jepang mempergunakan seorang pemimpin Indonesia yang terkemuka, agar pemuda-pemuda Kalimantan Timur bersedia menjadi Heiho dengan sukarela. Pimpinan yang dimaksud ini ialah A.M. Sangadji yang besar pengaruhnya di Samarinda dan sekitarnya, karena selama di daerah ini ia mendidik banyak kader di kalangan pemuda. Di samping itu A.M. Sangadji terkenal juga sebagai seorang pembicara ulung, karena keahliannya dalam berpidato itu dapat memukau orang-orang yang mendengarnya.

A.M. Sangadji memenuhi permintaan Jepang menarik para pemuda menjadi "prajurit pembela tanah air" tetapi bukan karena untuk membantu Jepang dalam peperangan, melainkan mempergunakan kesempatan tersebut sebagai latihan dalam mempergunakan alat-alat persenjataan perang.

Karena pidato-pidato dari A.M. Sangadji ini, di Samarinda beberapa pemuda mendaftarkan diri menjadi Heiho. Mereka dikirim ke Balikpapan untuk diberikan latihan kemiliteran, dan selanjutnya ditugaskan di beberapa obyek pertahanan di kota tersebut.

Tetapi sesudah angkatan udara Sekutu melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap kota Balikpapan dan menyebabkan hancurnya pertahanan Jepang, sebagian besar Heiho yang berasal dari Samarinda berjalan kaki menuju Samarinda dengan melintasi hutan. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, umumnya mereka menjadi pejuang bersenjata dalam mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di daerah ini.

Seperti halnya pada waktu Jepang menduduki Kalimantan Timur, yang dimulai dari arah Utara (Tarakan) demikian juga pada waktu Sekutu (Australia) menghancurkan Angkatan Perang Jepang dan merebut Kalimantan Timur dari penguasaannya, juga dimulai dari Tarakan.

Tentara Australia mendarat di Tarakan pada tanggal 1 Mei 1945 dan di Balikpapan pada tanggal 1 Juli 1945. Sesudah jatuhnya Balikpapan, serangan udara terhadap Samarinda dilakukan hampir setiap hari, adakalanya secara besar-besaran, dan adakalanya secara kecil-kecilan saja, sehingga praktis semua bangunan militer dan pabrik-pabrik yang ada di Samarinda dan sekitarnya menjadi rata dengan tanah. Pusat Kota Samarinda sendiri diserang dari udara dalam bulan Juli 1945, sehingga sebagian besar bangunannya menjadi puing-puing. Untunglah pada waktu itu

sebagian besar penduduk Samarinda sudah mengungsi - kekampung-kampung di belakang kota, sehingga korban jiwa di kalangan penduduk kecil sekali.

Tentara Sekutu (Australia) masuk Samarinda pada tanggal 16 September 1945, jadi lebih sebulan sesudah Jepang takluk tanpa syarat kepada Sekutu. Tetapi baik mengenai takluknya Jepang, maupun Proklamasi Kemerdekaan, sampai kepada masuknya tentara Australia itu, tidak diketahui secara pasti oleh penduduk Samarinda, apalagi oleh penduduk di daerah pedalaman (Hulu Mahakam). Sebab sejak Jepang mulai berkuasa pesawat-pesawat radio yang dimiliki oleh penduduk, semuanya diambil oleh Jepang.

Bahkan mengenai Kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, baru dalam minggu pertama bulan Oktober sampai di Samarinda.

Sebab di kalangan tentara Australia, tidak ada yang memberitahukannya (mungkin karena memang diinstruksikan demikian oleh pihak atasannya). Tahunya rakyat akan peristiwa yang sangat bersejarah itu, bermula dari orang-orang yang datang dari Jawa dengan menumpang pedangkang ke Samarinda.

Jepang sendiri sampai kepada masuknya tentara Sekutu pada pertengahan bulan September itu, tidak

pernah mengumumkan kepada rakyat tentang kekalahan-nya. Terhadap kenyataan bahwa sesudah pertengahan bulan Agustus 1945, pesawat-pesawat terbang Sekutu tidak pernah lagi melakukan serangan udara di Samarinda, Jepang hanya mengatakan bahwa sudah terjadi perdamaian, tanpa menjelaskan bahwa terjadinya perdamaian itu adalah karena Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.

Sementara itu A.M. Sangadji dan beberapa tokoh pejuang lainnya, oleh Jepang disuruh mengungsi ke daerah pedalaman, dari Long Iram mereka jalan darat menuju Kalimantan Selatan. Sampai di Puruk Tjahu, A.M. Sangadji yang kemudian mengetahui situasi yang sebenarnya, yakni bahwa Indonesia sudah Merdeka, menggabungkan diri dengan para pejuang di daerah itu. Di daerah ini dia ditawan oleh Belanda, kemudian dalam tahun 1946 dibawa ke Samarinda serta dimasukkan dalam tahanan di kota ini. Sesudah beberapa lama ditahan di penjara Samarinda, A.M. Sangadji di kirim ke Jawa oleh Belanda.

---oOo---

B A B V

P E N U T U P

Sebagai penutup dapatlah disimpulkan bahwa keadaan di daerah Kalimantan Timur pada akhir abad ke-19 dalam bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan alam pikiran/kepercayaan seperti juga di daerah-daerah lain di Indonesia agaknya banyak kaitannya dengan perkembangan di Eropa dan sistem/cara penjajahan yang dilaksanakan oleh Belanda. Tetapi di sana - sini terlihat juga adanya kekhususan-kekhususan daerah ini seperti dalam bidang pemerintahan penjajah menggunakan kaum feodal sebagai pembantunya. Sehingga kerajaan-kerajaan tetap hidup bahkan diberi stimulasi, tetapi kehidupan rakyatnya tidak berkembang.

Dalam bidang sosial budaya, terutama pendidikan memang ada usaha ke arah itu, terutama di daerah-daerah yang disebut Zelfbestuur (daerah pemerintahan kerajaan) tetapi sekedar untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Demikian juga dalam bidang ekonomi pemerintah menggunakan golongan feodal dan Cina.

Tetapi alam pikiran dan kepercayaan pengaruh Barat tidak begitu kelihatan pada rakyat biasa, hanya di kalangan bangsawan dan pegawai-pegawai pemerintah

jajahan.

Keadaan di daerah dari tahun 1900 - 1928, terutama yang berkaitan dengan Politik etika, meliputi edukasi, irigasi dan transmigrasi, agaknya kemudian diadakan, dibandingkan dengan daerah lain seperti di Jawa. Sekolah-sekolah baru bermunculan sekitar tahun dua puluhan, ini pun dalam ruang lingkup yang terbatas.

Kegiatan-kegiatan masyarakat yang relevan atau yang merupakan embrio dari kebangkitan nasional, dalam periode ini memang ada, seperti didirikannya S I (Sarekat Islam) di Samarinda 1913, N U dan Muham - madiyah tahun 1925 dan organisasi-organisasi pemuda seperti Young Mohammadan, Hisbul Wathan dan Anshor.

Sekitar Perang Dunia II (1914-1918) keadaan di daerah nampaknya makin sulit, walaupun secara langsung pengaruh peperangan itu tidak ada. Keadaan sosial ekonomi rakyat makin sulit, beban rakyat terhadap pemerintah Belanda makin berat. Pendidikan diadakan tetapi tidak meluas. Hanya satu aspek yang agaknya dibiarkan hidup berkembang menurut kemampuannya sendiri, yaitu kehidupan agama khususnya agama Islam.

Sedang untuk perjuangan di daerah sekitar 1914-1928 terutama yang berkaitan dengan fisik boleh di-

katakan tidak ada. Perjuangan ke arah ini baru nampak gejalanya sekitar tahun 1930 ke atas. Keadaan di daerah dari tahun 1928 - 1942 terutama yang menyangkut pengaruh politik pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930. Pada saat ini di Kalimantan Timur telah ada pemerintahan kerajaan sendiri yang disebut Zelfbestuur atau Landschap. Belanda memerintah atau menanamkan pengaruhnya melalui pemerintahan kerajaan ini, dengan melalui penempatan Asisten Residen dan controleur. Penjabat-penjabat Belanda inilah sebenarnya yang menentukan pemerintahan kerajaan itu.

Politik keras pemerintah jajahan Belanda terhadap gerakan non-koperasi tak banyak dijalankan, sehingga sejak semula gerakan-gerakan yang ada di daerah sudah ditekan. Demikian juga dalam lapangan pendidikan, Undang-Undang sekolah swasta pun dilaksanakan. Pada masa dunia dilanda oleh zaman malese, dalam ruang lingkup Indonesia, Kalimantan Timur turut terpengaruh karenanya.

Interaksi terhadap kepertaian, nampaknya di Kalimantan Timur ada suatu ironi. Di daerah-daerah pemerintahan kerajaan, tekanan terhadap organisasi-organisasi/partai-partai sangat berat, melebihi dari daerah-daerah yang dikuasai langsung oleh Peme -

rintah Belanda. Penekanan oleh Belanda terhadap organisasi politik bahkan non-politik terasa sangat keras pada waktu menjelang runtuhnya pemerintah Hindia Belanda. Di sana-sini terjadi penangkapan dan penahanan, bukan saja terhadap bangsa Indonesia, tetapi juga Cina dan bangsa-bangsa lainnya. Karena tekanan dan kemunduran yang dialami rakyat maka rakyat banyak yang menunjukkan sikap yang negatif terhadap Belanda dan pro Jepang. Oleh sebab itu keadaan Pemerintah Belanda di daerah pada saat terakhir dalam posisi yang sangat menyedihkan, baik pada saat sesudah Perang Dunia II pecah di Eropa, sesudah Negeri Belanda diduduki Nazi Jerman maupun sesudah Perang Pasifik pecah.

Kedatangan pasukan Jepang, mengubah udara politik dan pemerintahan di Indonesia dan Kalimantan Timur. Jepang berpropaganda sebagai saudara tua, untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Propaganda ini rupanya banyak pengaruhnya, sehingga waktu tentara Jepang masuk, dipandang sebagai tentara "pembebasan".

Tetapi harapan rakyat itu nyatanya sangat keliru, bukan pembebasan yang dirasakan, tetapi penekanan dan penindasan yang lebih berat, terutama terhadap mereka yang dicurigai memihak Belanda, dan kemudian juga terhadap para pejuang kemerdekaan termasuk partai-partai politik dan organisasi-organisasinya.

Bangsa Indonesia yang tinggal di Kalimantan Timur mengubah siasat seolah-olah pro Jepang. Ternyata kemudian terjadi senjata makan tuan bagi Jepang dan di pihak lain merupakan modal / kekuatan - untuk menghadapi Belanda yang akan berkuasa kembali di Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

--oOo--

DAFTAR TATANAMA DAN ISTILAH

- A. Achmad Nino Hadjarati
Achmad Noor
Adam Malik
Adspirant Controleur
Adviseerende Lichaam
Afdeling
Aji Bambang
Aji Bambang Musa
Aletivetes
Algemene Volks Credit Bank
Ambtenaar
Aminah Syukur — Amerika Serikat
A.M. Parikesit
A.M. Sangadji
Anang Acil
Anasira
Anggana
Animisme
Anshar
Amerika Serikat
A r a b
Arab Melayu
A. Rasjid
Artikel 153 bis dan ter.

Artikel 310 Bis KUHP

Asia Timur

Asisten Residen

Aswin Toyo

Australia

Autentik

Authority

B. B a l i

Balikpapan

Bambang Abd. Rahman

Banjarmasin

B a n k

B a n z a i

Baren Van Hoevel

Barter

Belanda

Belanda Indo

Bendera Hinomaru

Bendera Merah Putih

B e r a u

Bezuiniging

B I C (Bond van Indonesische Chauffeurs)

Borsumy (NV)

B P M (Bataafsche Petroleum Maatschappij)

Budi Utomo

Bulongan
Bumi Putra
Bustani Hs.

C. Cecunguk

Cung Hua Cung Hui

C i n a

Controleur

Controleur Van Oost Kutai

Cultuur Stelsel

D. Dai Nippon

D a t a

Depresi (ekonomi)

Dewan (Raad)

Drs. Ak. Gani

E. Eduard Douwes Dekker, 12

E L S (Europeshe Lagere School)

Emigrasi

Erakan

Eropa

Efikan

Efis

F. F e o d a l

G. G a p i

Gedelegeerde

Generasi

Gerakan Indonesia Berparlemen

Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia)

Gouvernement H I S

Gouvernement rechtstreeksbestuur gebied

Gunung Tabur

H. H. Abd. Gani

H. Abd. Manap

H. Abd. Madjid

H. Abdus Samad

H a r a

H. Arief Rachim

H.A. Salim

H a w a i i

H C S (Holandsch Chinesche School).

H e i h o

Heitaisan

H. Imaluddin Ishak

Hindia Belanda

H I S (Hollands Inlandse School)

H. Ismail

H I S Partikulier

Hoofdagent

H. Siregar

H. Soelaiman

H W (Hizbul Wathan)

I. I n d i a

I n d i a n

Indische Partij

I n d o n e s i a

Indonesia Berparlemen

Indonesia Berpemerintahan Sendiri

Industri

Inflasi

Inggris

Inlandse School

Inspektur

Intelektuil

Interaksi

Internasional

Irigasi

Ishak Sani

Iskandar

I s l a m

J. Jakarta

J a w a

Jepang

Jerman

K. Kaigun

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kamaludin

Kartanegara

Kebudayaan Daerah

Kei Bitai

Kenohan (dikenohan)

Kenyah

Kerapatan Besar

Kerapatan Kecil

K.H. Abdullah Marisi

Kiayi (penjawat)

Kimigayo

KNIL

Kong Hu Cu

Koperator

Kota Baru

Kota Buruh

Krisis Ekonomi

Kristen

K u t a i

L. Landschap

Landswacht

Landraad

Lijdelijk Verzet

Lim Ek Thoean

Loa Kulu

Leng Iram

M. Mahakam

Makassar

Maksoem Karim

Malese (zaman)

M. Amin

Mangkubumi

M. Djamdjam

M. Djunaid

M e k a h

Meleset (zaman)

Menuju Indonesia Merdeka

Metode

M. Hoesni Thamrin

M I A I

M i l i s i

Mohammad Hatta

Mr. Amir Syarifuddin

M. Rasyad

M. S i d i k

M. Soedjono

Muballigh

Muhammadiyah

M u k m i n

Mulo (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)

Musyawarah Thalibun.

N. N. A b e

Nahdlatul Ulama

Nasional

Nazi (Jerman)

Neutrale School

N i c a

Non Koperasi

Non Koperator

Normaal School

N R K (Nanyo Rinjo Kaisha)

Nusakambangan (Cilacap)

Nusantara

O. O B M (Oost Borneo Maatschappij)

Oemar Dahlan

Onderbouw

Oost Borneo

Openbare Vergadering

O s v i a

Over Produksi

P. Panggilan Waktu.

Parapatan
Parindra
Parlemen
Partai Komunis Indonesia
Partai Nasional Indonesia
Partindo
P a s i r
Pasir Belengkong
Pastor
Pearl Harbour
Pedangkang
Pendidikan Rakyat Indonesia
Pengerempengan
Penjabat
Penyadar
Perajurit Pembela Tanah Air
Perang Pasifik
Perang Suci
Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan In -
donesia (P F P K I)
Persatuan Bangsa Indonesia
Persdelict
Petinggi
Petisi Soetardjo
Pewarta Borneo
Philipina

Pikiran Rakyat

P N I - Baru

Polandia

Politieke Inlichtingen Dienst

Politik Keras

Pranata

Proklamasi Kemerdekaan

Protestan

P S I I

Puruk Tjohu.

R. R a a d

Radikal

Ratio

Reaksi

Reaksioner

Rechtstreeks Gouvernements Bestuur Gebied.

Res dan Co

Residen

Residentie Zuid en Oost Borneo

Revolusioner

Rustam Effendi

S. Sabotase

Samarinda

Sambaliung

Sanga-Sanga
Sangkulirang
Sayuti Lubis
Schrijver
Sejarah Daerah
Sejarah Nasional
Sekutu
S I
Sistematis
S M P (Steenkolen Maatschappij Parapattan)
Soekarno
Soekarno - Hatta
Sosial
Spreekdelict
Stadswacht
Staat Van Oorlog
Stelsel
Strategi
Sultan
Sumpah Pemuda
Surabaya
Surat Kabar Nasional
Survai
Surya Wirawan
Simpatie.

T. Taman Siswa
Tanah Grogot
Tanjidor
Tanjung Redep
Tanjung Selor
Tarakan
Teluk Bayur
Tenggarong
Theodore Conradt Van Deventer
Tidung
Tidung Landen
Tionghoa
Tionghoa Melayu
Tiongkok
Toko Syarikat Dagang Islam
T o k y o
Tradisi
Tradisional
Transmigrasi
Trilogi

U. U l a m a

V. Van Oost Kutai
Verpleger

Vervolg School
Vierkantepaal gebied
Voertaal

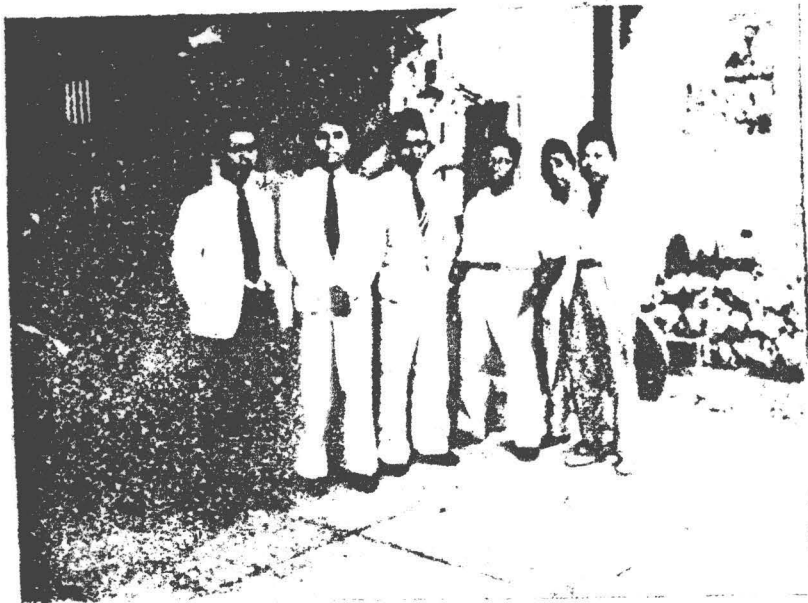
W. Wachtgeld
W a h e l
Warisan Nasional
Wilde Scholen Ordonnantie
Wing Phing Trading - Co

Y. Y M (Young Mohammadan)
Y M Holid
Yudikatif.

Z. Zelfbestuur.

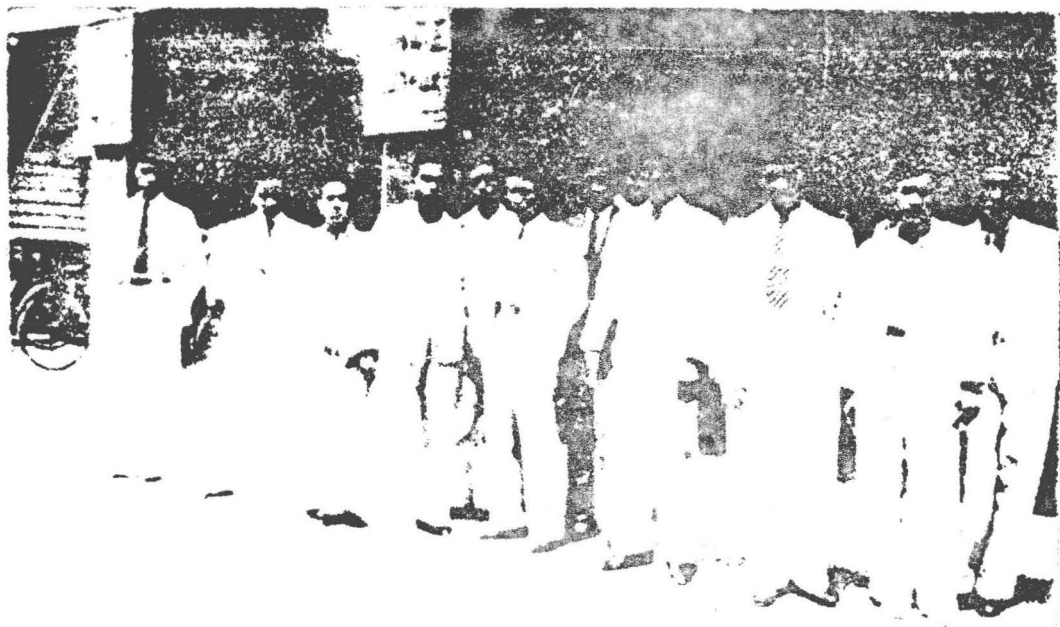
DAFTAR SUMBER

- Burger, D.H. Prof. Dr., Sedjarah Ekonomi Sosiologis Indonesia, saduran Prayudi A., Prajnaparamita, Jakarta, 1962.
- Dekker, I. Nyoman, Drs. S.H., Sedjarah Indonesia Baru Masa 1800 - 1905, IKIF Malang
- Djakatirta, R.A. Drs. dan Pudjosubroto, Santoso, Mr. Sedjarah Perekonomian, Gadjah Mada, Yogya - karta, 1962.
- Executive Body For the Population Resettlement Scheme, First Level Region East of Kalimantan, Paper on the Problem of Population Resettlement in East Kalimantan.
- Pringgodigdo, AK, Mr., Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pustaka Rakyat, Jakarta 1950.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1976/1977, Sejarah Daerah Kalimantan Timur.



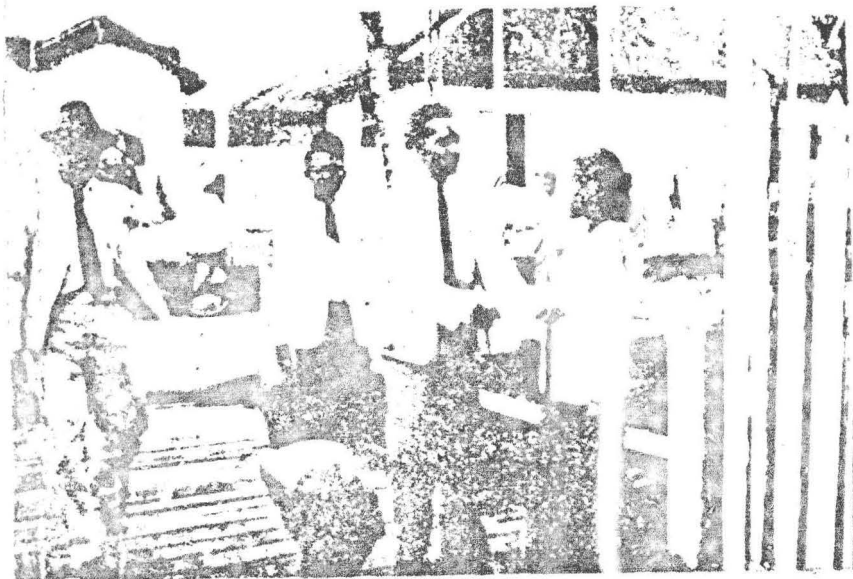
Gambar 1.

Dr. A.K. Gani (No. 2 dari kiri) dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Besar Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) sewaktu berada di Samarinda tahun 1938, mengunjungi Kantor Redaksi Surat Kabar "Pantjaran Berita" dan diambil fotonya bersama beberapa anggota Pengurus Besar Gerindo Cabang Samarinda di depan Kantor ini. Paling kiri Cemar Dahlan (waktu itu anggota redaksi "Pantjaran Berita"), No. 3 dari kiri Aswin Toyo, No. 4 SH. Alkaff (pemimpin redaksi "Pantjaran Berita"), sedang di ujung sebelah kanan M. Djoenaedi.



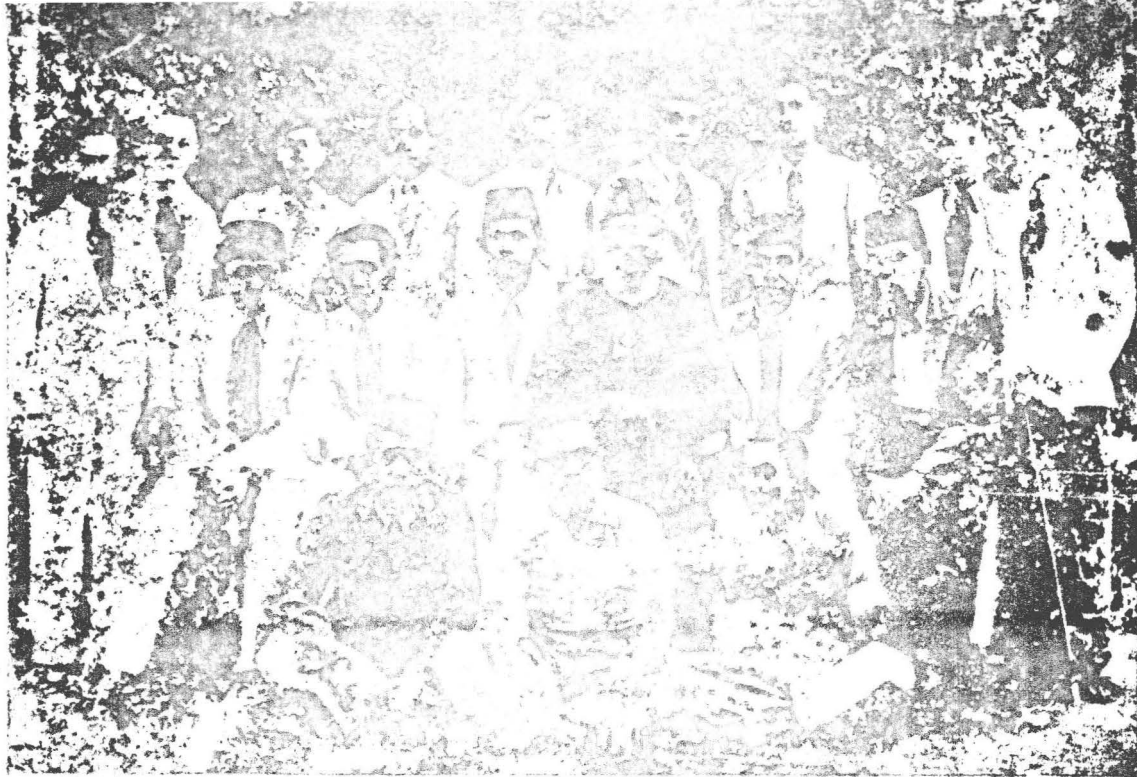
Gambar 2.

Anggota Pengurus dan sebagian dari anggota Gerindo cabang Samarinda bergambar di gedung bioskop "Gloria" sehabis mengadakan rapat umum (opentare vergadering) dalam gedung bioskop ini pada pertengahan tahun 1939.



Gambar 3.

Dr. A.K. Gani sewaktu baru tiba di Samarinda dan disambut (berjabat tangan dengan Ny. Dr. Sahir Niti-hardjo) sewaktu akan memasuki pekarangan rumahnya, di mana Dr. A.K. Gani menginap selama di Samarinda. Di belakang Dr. A.K. Gani ialah Oemar Dachlan, sedang di kiri (yang memakai topi) ialah Dr. Sahir.



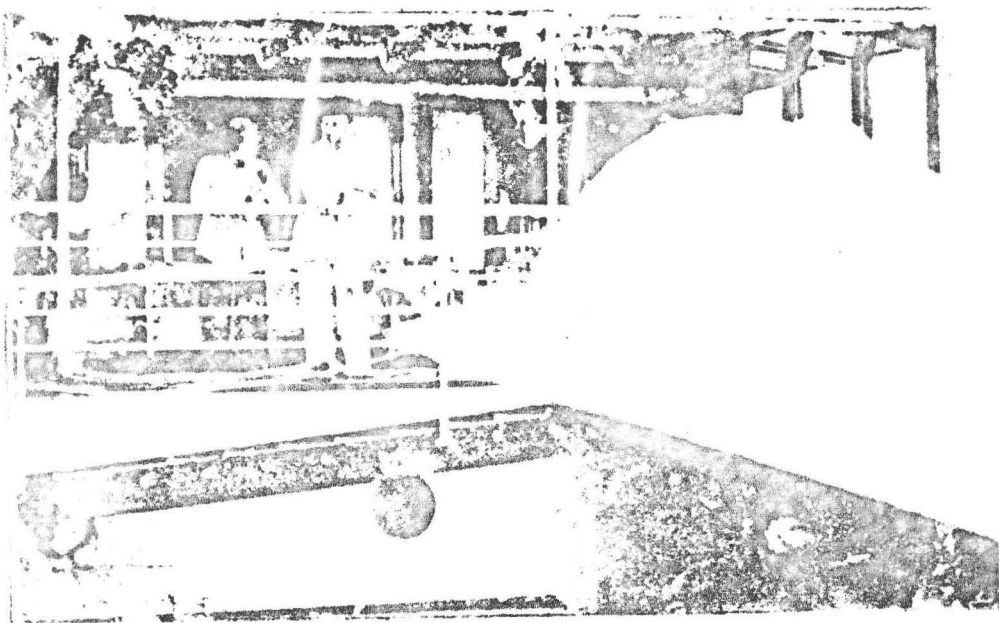
Gambar 4

A.M. Sangadji (duduk di tengah berpakaian hitam) bergambar bersama-sama sebagian besar pemuda pejuang yang dimasukkan dalam tahanan Jepang dari tgl. 10 s/d 19 Mei 1942 di Samarinda, karena mengadakan aksi menuntut kemerdekaan Indonesia yang oleh Jepang pada waktu itu dilarang. Foto ini diambil sesudah mereka keluar dari tahanan, sebagai kenang-kenangan.



Gambar 5.

Dr. A.K. Geni (No. 3 dari kiri) yang baru datang di Samarinda, sedang dalam perjalanan menuju rumah Dr. Sahir Nitihardjo (No. 2 dari kiri), dimana dia menginap, dengan diiringi juga oleh anggota pengurus Gerindo cabang Samarinda, yakni M. Djaenaedi (paling kanan). Terjadinya dalam tahun 1938.



Gambar 6.

Foto kenangan sewaktu M. Husni Thamrin, anggota Pengurus Besar Parindra dan anggota Gedelegeerde Volksraad dalam tahun 1936 berkunjung ke Samarinda. Foto ini diambil sewaktu kapal K.P.M. yang ditumpangnya hendak merapat di Pelabuhan. Berdiri di sebelahnya, ialah Ny. M.H. Thamrin.

